



Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Natuna

BUKU 2

ARSITEKTUR PROSES BISNIS - LAYANAN - DATA DAN INFORMASI

Pekerjaan:

Penyusunan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana
Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Tahun 2022 - 2026



PENYUSUNAN DOKUMEN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE

BUKU 2 - ARSITEKTUR PROSES BISNIS – LAYANAN – DATA DAN INFORMASI

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NATUNA**

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji Syukur, atas perkenan Tuhan YME Buku 2: Arsitektur Data dan Informasi, Layanan SPBE dan Proses telah selesai. Dokumen ini berisi gambaran Peta Proses Bisnis, Layanan SPBE serta Data dan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Natuna.

Buku ini merupakan salah satu keluaran dari pekerjaan Pembuatan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kabupaten Natuna, Tahun 2022.

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang merupakan suatu sistem tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pada suatu instansi pemerintahan.

Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan ini akan didapatkan acuan berupa rumusan rencana strategis pembangunan dan pengembangan SPBE yang diantaranya mampu menjamin keselarasan antara pembangunan / pengembangan SPBE dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 Kabupaten Natuna, menjamin ketersediaan dukungan SPBE dengan tugas pokok dan fungsi semua OPD pemerintah Kabupaten Natuna, serta memenuhi kesenjangan antara kondisi eksisting lingkungan sistem informasi saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai di akhir tahun 2026.

Pada Buku selanjutnya yaitu Buku 3, akan di jelaskan terkait Arsitektur Aplikasi SPBE.

Natuna, Agustus 2022

Bupati Natuna



Wan Siswandi, S.Sos., M.Si

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	II
DAFTAR TABEL.....	III
DAFTAR ISTILAH (TERMINOLOGI)	IV
BAB I ARSITEKTUR PROSES BISNIS	1
1.1 KATALOG PROSES BISNIS	1
1.2 KATALOG AKTOR.....	9
1.3 PETA PROSES BISNIS	13
1.4 PEMODELAN PROSES BISNIS	18
1.4.1. PROSES BISNIS UTAMA.....	19
1.4.2. PROSES BISNIS MANAJERIAL	20
1.4.3. PETA BISNIS PENDUKUNG	21
1.5 PETA LINTAS FUNGSI	21
BAB II ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI	42
2.1 REFERENSI ARSITEKTUR DATA	42
2.2 ARSITEKTUR DATA	43
2.2.1. Diagram Kontek Relasi Data Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Natuna.....	58
2.2.2. Diagram Kontek Relasi Data Urusan Pemerintah Kabupaten Natuna	58
2.2.3. Model Layanan Pertukaran Dan Integrasi Data	59
2.3 GUDANG DATA DAN BUSINESS INTELLIGENT DI PEMERINTAHAN KABUPATEN NATUNA	59
2.4 PENGELOLAAN KUALITAS DATA	60
2.5 PENGELOLAAN KONTEN DAN DOKUMEN	61
BAB III ARSITEKTUR LAYANAN	62
3.1 REFERENSI ARSITEKTUR LAYANAN	62
3.2 ARSITEKTUR KONSEPTUAL LAYANAN SPBE.....	70
3.3 PETA LAYANAN LAYANAN SPBE	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Proses Bisnis Level 0	14
Gambar 1. 2 Peta Proses Bisnis Level 1 – NTX 01	15
Gambar 1. 3 Peta Proses Bisnis Level 1 – NTX 02	15
Gambar 1. 4 Peta Proses Bisnis Level 1 – NTX 03	15
Gambar 1. 5 Peta Proses Bisnis Level 1 – NTX 04	16
Gambar 1. 6 Peta Proses Bisnis Level 1 – NTX 05	17
Gambar 1. 7 Peta Proses Bisnis Level 1 – NTX 06	17
Gambar 1. 8 Peta Proses Bisnis Level 1 – NTX 07	17
Gambar 1. 9 Proses Bisnis Utama	19
Gambar 1. 10 Proses Bisnis Manajerial	20
Gambar 1. 11 Proses Bisnis Pendukung.....	21
Gambar 2. 1 Arsitektur Referensi	42
Gambar 2. 2 Diagram Kontek Relasi Data Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Natuna	58
Gambar 2. 3 Diagram Kontek Relasi Urusan Pemerintahan Kabupaten Natuna.....	58
Gambar 2. 4 Model Layanan Pertukaran dan Integrasi Data	59
Gambar 2. 5 Gudang Data dan Business Intelligent	59
Gambar 2. 6 Pengelolaan Kualitas Data.....	60
Gambar 2. 7 Persyaratan Kualitas Data	60
Gambar 2. 8 Pengelolaan Konten dan Dokumen	61
Gambar 3. 1 Konseptual Layanan SPBE.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Katalog Proses Bisnis	1
Tabel 1. 2 Katalog Aktor.....	9
Tabel 1. 3 Peta Lintas Fungsi.....	22
Tabel 2. 1 Inventaris Entitas.....	43
Tabel 3. 1 Referensi Arsitektur Layanan	62
Tabel 3. 2 Pemetaan Layanan Terhadap Urusan Pemerintah Kabupaten Natuna	73

DAFTAR ISTILAH (TERMINOLOGI)

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018, berikut ketentuan umum atau penjelasan dari beberapa istilah yang tertuang dalam dokumen ini:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
3. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
4. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
5. Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
6. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
7. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
8. Arsitektur SPBE Instansi Pusat adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di instansi pusat.
9. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
10. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
11. Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.
12. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di instansi pusat.
13. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.

15. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
16. Infrastruktur SPBE Nasional adalah Infrastruktur SPBE yang terhubung dengan Infrastruktur SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah.
17. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
18. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
19. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
20. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
21. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
22. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
23. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
24. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
25. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
26. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

27. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
28. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB I

ARSITEKTUR PROSES BISNIS

1.1 KATALOG PROSES BISNIS

Berikut merupakan katalog proses bisnis Kabupaten Natuna :

Tabel 1. 1 Katalog Proses Bisnis

No	Kode Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Kategori
1	NTX 01	Akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Utama
2	NTX 01.01	Meningkatnya pengamalan agama didalam kehidupan masyarakat	Utama
3	NTX 01.01.01	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan budaya lokal melalui pendidikan karakter dan keagamaan di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat	Utama
4	NTX 01.01.02	Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan budaya literasi	Utama
5	NTX 01.02	Meningkatnya kualitas pendidikan	Utama
6	NTX 01.02.01	Peningkatan layanan kesehatan secara merata melalui pemenuhan tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan	
7	NTX 01.03	Meningkatnya kualitas kesehatan	Utama
8	NTX 01.03.01	Peningkatan Program Pembangunan Berbasis Gender melalui penguatan kapasitas politik dan ekonomi perempuan	
9	NTX 01.04	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Utama
10	NTX 02	Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal	Utama
11	NTX 02.01	Meningkatnya perekonomian di sektor pertanian dan perikanan	Utama
12	NTX 02.01.01	Menguatkan dukungan sarana dan prasarana produksi Pertanian, Perikanan serta kualitas sumber daya petani dan nelayan	Utama
13	NTX 02.02	Meningkatnya perekonomian di sektor pariwisata	Utama
14	NTX 02.02.01	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah dan daya tarik pariwisata dan mendorong ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	Utama

No	Kode Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Kategori
15	NTX 02.03	Meningkatnya iklim investasi yang sehat, aman dan kondusif	Utama
16	NTX 02.03.01	Memperkuat sistem informasi penanaman modal	Utama
17	NTX 02.04	Meningkatnya perekonomian di sector perindustrian dan perdagangan	Utama
18	NTX 02.04.01	Menguatkan nilai produksi industri dan nilai ekspor barang industri serta menguatkan sarana distribusi perdagangan	Utama
19	NTX 02.05	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Utama
20	NTX 02.05.01	Menguatkan nilai produksi industri dan nilai ekspor barang industri serta menguatkan sarana distribusi perdagangan	Utama
21	NTX 02.06	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat.	Utama
22	NTX 02.06.01	Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja	Utama
23	NTX 02.06.02	Peningkatan Daya Beli Masyarakat dengan menjaga stabilitas harga barang	Utama
24	NTX 03	Menciptakan Kawasan perbatasan yang aman, strategis, dan eksotis	Utama
25	NTX 03.01	Meningkatnya pembangunan kawasan perbatasan	Utama
26	NTX 03.01.01	Peningkatan Keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan PERDA	Utama
27	NTX 03.02	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Utama
28	NTX 03.02.01	Peningkatan Pembangunan Kawasan Pariwisata	Utama
29	NTX 03.03	Meningkatnya Kawasan strategis pariwisata	Utama
30	NTX 03.03.01	Peningkatan Pembangunan Kawasan Nasional Strategis Tertentu	Utama
31	NTX 03.04	Meningkatnya produktifitas kawasan strategis perikanan tangkap	Utama
32	NTX 04	Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur	Utama
33	NTX 04.01	Meningkatnya infrastruktur antar wilayah	Utama
34	NTX 04.01.01	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan memperkuat konektivitas antar wilayah	Utama
35	NTX 04.02	Meningkatnya penataan bangunan gedung strategis kabupaten	Utama
36	NTX 04.02.01	Peningkatan Infrastruktur Gedung Pemerintahan	Utama
37	NTX 05	Menciptakan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup	Utama

No	Kode Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Kategori
		yang berkelanjutan	
38	NTX 05.01	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Utama
39	NTX 05.01.01	Peningkatan kualitas dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Utama
40	NTX 06	Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (smart bureaucracy)	Utama
41	NTX 06.01	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Utama
42	NTX 06.01.01	Percepatan reformasi birokrasi	Utama
43	NTX 07	Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Utama
44	NTX 07.01	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	Utama
45	NTX 07.01.01	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Utama
46	NTX 11	Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah	Manajemen
47	NTX 11.01	Perencanaan Pembangunan Daerah	Manajemen
48	NTX 11.01.01	Penyusunan RPJPD	Manajemen
49	NTX 11.01.01.01	Penyusunan Dokumen RPJPD	Manajemen
50	NTX 11.01.01.02	Monitoring Penyusunan Dokumen RPJPD	Manajemen
51	NTX 11.01.02	Penyusunan RPJMD	Manajemen
52	NTX 11.01.02.01	Penyusunan Dokumen RPJMD	Manajemen
53	NTX 11.01.02.02	Monitoring Penyusunan Dokumen RPJMD	Manajemen
54	NTX 11.01.03	Penyusunan KLHS	Manajemen
55	NTX 11.01.03.01	Penyusunan Dokumen KLHS	Manajemen
56	NTX 11.01.03.02	Monitoring Penyusunan Dokumen KLHS	Manajemen
57	NTX 11.01.04	Penyusunan Renstra PD	Manajemen
58	NTX 11.01.04.01	Penyusunan Dokumen Renstra PD	Manajemen
59	NTX 11.01.04.02	Monitoring Penyusunan Dokumen Renstra PD	Manajemen
60	NTX 11.01.05	Penyusunan RKPD	Manajemen
61	NTX 11.01.05.01	Penyusunan Dokumen RKPD	Manajemen
62	NTX 11.01.05.02	Monitoring Penyusunan Dokumen RKPD	Manajemen
63	NTX 11.01.06	Penyusunan Renja PD	Manajemen
64	NTX 11.01.06.01	Penyusunan Dokumen Renja PD	Manajemen
65	NTX 11.01.06.02	Monitoring Penyusunan Dokumen Renja PD	Manajemen
66	NTX 11.01.07	Penyelarasan Pembangunan Daerah	Manajemen
67	NTX 11.02	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Manajemen
68	NTX 11.02.01	Pengendalian dan Evaluasi Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	Manajemen
69	NTX 11.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah	Manajemen

No	Kode Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Kategori
70	NTX 11.02.03	Pengendalian dan Evaluasi Hasil Kebijakan Pembangunan Daerah	Manajemen
71	NTX 11.03	Analisis, Profil dan Informasi Pembangunan Daerah	Manajemen
72	NTX 11.03.01	Analisis dan Profil Pembangunan Daerah	Manajemen
73	NTX 11.03.02	Profil Pembangunan Daerah	Manajemen
74	NTX 11.03.03	Informasi Pembangunan Daerah Berdasarkan 7 Aspek Pembangunan Daerah	Manajemen
75	NTX 11.04	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah	Manajemen
76	NTX 11.04.01	Pokok Pikiran DPRD	Manajemen
77	NTX 11.04.02	Konsultasi Publik	Manajemen
78	NTX 11.04.03	Pelaksanaan Musrenbang	Manajemen
79	NTX 11.04.04	Forum SKPD	Manajemen
80	NTX 12	Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	Manajemen
81	NTX 12.01	Penganggaran Keuangan Daerah	Manajemen
82	NTX 12.01.01	Penyusunan KUA PPAS	Manajemen
83	NTX 12.01.02	Penyusunan RKA PD	Manajemen
84	NTX 12.01.03	Penyusunan Rancangan APBD	Manajemen
85	NTX 12.01.04	Penetapan APBD	Manajemen
86	NTX 12.01.05	Pergeseran Anggaran	Manajemen
87	NTX 12.01.06	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Manajemen
88	NTX 12.01.07	Perubahan RKA PD	Manajemen
89	NTX 12.01.08	Penyusunan Rancangan Perubahan APBD	Manajemen
90	NTX 12.01.09	Penetapan Perubahan APBD	Manajemen
91	NTX 12.02	Pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah	Manajemen
92	NTX 12.02.01	Manajemen KAS	Manajemen
93	NTX 12.02.02	Pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah Penerimaan	Manajemen
94	NTX 12.02.02.01	Penyusunan DPA dan Anggaran KAS Penerimaan SKPD	Manajemen
95	NTX 12.02.02.02	Pelaksanaan dan penatausahaan Pendapatan	Manajemen
96	NTX 12.02.02.03	Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan pembiayaan	Manajemen
97	NTX 12.03	Penyusunan Informasi Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah	Manajemen
98	NTX 12.03.01	Penyusunan laporan realisasi anggaran	Manajemen
99	NTX 12.03.01.01	LRA Semester 1 dan Prognosis	Manajemen
100	NTX 12.03.01.02	LRA Periodik	Manajemen
101	NTX 12.03.02	Penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih	Manajemen
102	NTX 12.03.03	Penyusunan laporan operasional	Manajemen

No	Kode Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Kategori
103	NTX 12.03.04	Penyusunan laporan perubahan ekuitas	Manajemen
104	NTX 12.03.05	Penyusunan neraca	Manajemen
105	NTX 12.03.06	Penyusunan laporan arus kas	Manajemen
106	NTX 12.03.07	Penyusunan catatan atas laporan keuangan	Manajemen
107	NTX 12.04	Penyusunan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Manajemen
108	NTX 12.04.01	Penyusunan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Manajemen
109	NTX 12.04.02	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Manajemen
110	NTX 12.05	Pengelolaan BMD	Manajemen
111	NTX 12.05.01	Perencanaan kebutuhan dan penganggaran	Manajemen
112	NTX 12.05.02	Pengadaan	Manajemen
113	NTX 12.05.03	Penggunaan	Manajemen
114	NTX 12.05.04	Pemanfaatan	Manajemen
115	NTX 12.05.05	Pengamanan dan Pemeliharaan	Manajemen
116	NTX 12.05.06	Penilaian	Manajemen
117	NTX 12.05.07	Pemindahtanganan	Manajemen
118	NTX 12.05.08	Pemusnahan	Manajemen
119	NTX 12.05.09	Penghapusan	Manajemen
120	NTX 12.05.10	Penatausahaan	Manajemen
121	NTX 12.05.11	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	Manajemen
122	NTX 12.05.12	Pengelolaan Barang oleh BLUD	Manajemen
123	NTX 12.06	Pengelolaan BLUD	Manajemen
124	NTX 12.06.01	Perencanaan BLUD	Manajemen
125	NTX 12.06.02	Penganggaran BLUD	Manajemen
126	NTX 12.06.03	Penatausahaan Keuangan BLUD	Manajemen
127	NTX 12.06.03.01	Perencanaan dan Penganggaran	Manajemen
128	NTX 12.06.03.02	Pelaksanaan Anggaran	Manajemen
129	NTX 12.06.03.03	Pengelolaan Kas	Manajemen
130	NTX 12.06.03.04	Pengelolaan utang piutang	Manajemen
131	NTX 12.06.03.05	Pengelolaan Investasi	Manajemen
132	NTX 12.06.04	Akuntan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Manajemen
133	NTX 12.07	Pelaporan BUMD	Manajemen
134	NTX 12.07.01	Profil BUMD	Manajemen
135	NTX 12.07.02	Laporan Keuangan	Manajemen
136	NTX 12.08	Pengelolaan Pajak dan Retribusi	Manajemen
137	NTX 12.08.01	Pengelolaan Kebijakan Pajak dan Retribusi	Manajemen
138	NTX 12.08.02	Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Pajak dan Retribusi	Manajemen
139	NTX 13	Pelaporan dan Evaluasi	Manajemen

No	Kode Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Kategori
		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
140	NTX 13.01	Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Manajemen
141	NTX 13.01.01	Pembentukan Tim	Manajemen
142	NTX 13.01.02	Pengumpulan Data	Manajemen
143	NTX 13.01.03	Penyusunan Dokumen Data dan Dasar Capaian Kerja	Manajemen
144	NTX 13.01.04	Verifikasi dan Penilaian dokumen Data Dasar	Manajemen
145	NTX 13.01.05	Penyusunan & Penyampaian LPPD	Manajemen
146	NTX 13.01.05.01	Penyusunan LPPD	Manajemen
147	NTX 13.01.05.02	Penyampaian LPPD	Manajemen
148	NTX 13.01.06	Penyusunan & Penyampaian LKPD	Manajemen
149	NTX 13.01.06.01	Penyusunan LKPD	Manajemen
150	NTX 13.01.06.02	Penyampaian LKPD	Manajemen
151	NTX 13.01.07	Penyusunan & Penyampaian RLPPD	Manajemen
152	NTX 13.01.07.01	Penyusunan RLPPD	Manajemen
153	NTX 13.01.07.02	Penyampaian RLPPD	Manajemen
154	NTX 13.02	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Manajemen
155	NTX 13.02.01	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi	Manajemen
156	NTX 13.02.02	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota	Manajemen
157	NTX 13.02.03	Penyampaian Hasil Evaluasi	Manajemen
158	NTX 13.02.03.01	Penyampaian Hasil EPPD Kabupaten/Kota	Manajemen
159	NTX 13.02.03.02	Penyampaian Hasil EPPD Provinsi	Manajemen
160	NTX 13.02.04	Tindaklanjut Hasil Evaluasi	Manajemen
161	NTX 13.02.04.01	Pertimbangan Pemberian Penghargaan	Manajemen
162	NTX 13.02.04.02	Sinkronisasi Perencanaan dan Penetapan Target Pembangunan Pusat dan Daerah	Manajemen
163	NTX 13.02.04.03	Pembinaan Peningkatan Kemampuan Pemerintahan Daerah	Manajemen
164	NTX 13.03	Manajemen Kinerja SPBE OPD	Manajemen
165	NTX 13.03.01	Pembinaan Peningkatan Kinerja SPBE OPD	Manajemen
166	NTX 13.03.02	Fasilitasi Peningkatan Kinerja SPBE OPD	Manajemen
167	NTX 14	Manajemen PERDA	Manajemen
168	NTX 14.01	Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah	Manajemen
169	NTX 14.02	Penyusunan & Pembahasan Produk Hukum Penetapan	Manajemen
170	NTX 14.02.01	Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Manajemen
171	NTX 14.02.02	Pembahasan Produk Hukum Penetapan	Manajemen
172	NTX 14.03	Penyusunan & Pembahasan Produk Hukum Peraturan	Manajemen

No	Kode Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Kategori
173	NTX 14.03.01	Penyusunan Produk Hukum Peraturan	Manajemen
174	NTX 14.03.02	Pembahasan Produk Hukum Peraturan	Manajemen
175	NTX 14.04	Pembinaan & Evaluasi Produk Hukum Peraturan	Manajemen
176	NTX 14.04.01	Pembinaan Produk Hukum Peraturan	Manajemen
177	NTX 14.04.02	Evaluasi Produk Hukum Peraturan	Manajemen
178	NTX 14.05	Pelaksanaan Register Produk Hukum	Manajemen
179	NTX 14.06	Penetapan Penomoran Pengundangan dan Autentifikasi	Manajemen
180	NTX 14.07	Pembatalan Produk Hukum	Manajemen
181	NTX 15	Manajemen Kelembagaan dan SDM Daerah	Manajemen
182	NTX 15.01	Penataan, Pembentukan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Manajemen
183	NTX 15.01.01	Penataan Perangkat Daerah	Manajemen
184	NTX 15.01.02	Pembentukan Perangkat Daerah	Manajemen
185	NTX 15.01.03	Evaluasi Perangkat Daerah	Manajemen
186	NTX 15.02	Pengelolaan dan Pengembangan SDM Daerah	Manajemen
187	NTX 15.02.01	Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM Daerah	Manajemen
188	NTX 15.02.02	Penyusunan Persyaratan Kompetensi SDM Daerah	Manajemen
189	NTX 15.02.03	Penyusunan Standar Kompetensi SDM Daerah	Manajemen
190	NTX 15.02.04	Pelaksanaan Uji Kompetensi SDM Daerah	Manajemen
191	NTX 15.02.05	Pengembangan Kompetensi SDM Daerah	Manajemen
192	NTX 15.02.06	Pendidikan dan Pelatihan	Manajemen
193	NTX 15.02.07	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Daerah	Manajemen
194	NTX 15.03	Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Manajemen
195	NTX 16	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Manajemen
196	NTX 16.01	Pengawasan Umum Pemerintah Daerah	Manajemen
197	NTX 16.01.01	Pengawasan Umum oleh Inspektorat Kemendagri	Manajemen
198	NTX 16.01.02	Pengawasan Umum oleh Inspektorat Daerah	Manajemen
199	NTX 16.02	Pengawasan Teknis Pemerintah Daerah	Manajemen
200	NTX 16.02.01	Pengawasan Teknis oleh Inspektorat K/L penanggung jawab urusan	Manajemen
201	NTX 16.02.02	Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Daerah	Manajemen
202	NTX 21	Administrasi Kewilayahan	Pendukung
203	NTX 21.01	Pengelolaan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara	Pendukung
204	NTX 21.01.01	Pengelolaan Kawasan	Pendukung

No	Kode Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Kategori
205	NTX 21.01.02	Pengelolaan Perkotaan	Pendukung
206	NTX 21.01.03	Pengelolaan Batas Negara	Pendukung
207	NTX 21.02	Pengelolaan Toponimi, dan Batas Daerah	Pendukung
208	NTX 21.02.01	Pengelolaan Toponimi	Pendukung
209	NTX 21.02.02	Pengelolaan Batas Daerah	Pendukung
210	NTX 22	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pendukung
211	NTX 22.01	Pendaftaran Penduduk	Pendukung
212	NTX 22.02	Pencatatan Sipil	Pendukung
213	NTX 22.03	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pendukung
214	NTX 22.04	Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pendukung
215	NTX 22.05	Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Pendukung
216	NTX 23	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pendukung
217	NTX 23.01	Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum	Pendukung
218	NTX 23.02	Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	Pendukung
219	NTX 24	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Pendukung
220	NTX 24.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Pendukung
221	NTX 24.02	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pendukung
222	NTX 24.03	Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya	Pendukung
223	NTX 24.04	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Pendukung
224	NTX 24.05	Koordinasi Pelaksanaan Tugas antar instansi Pemerintahan	Pendukung
225	NTX 24.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Pendukung
226	NTX 24.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Pendukung
227	NTX 25	Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik	Pendukung
228	NTX 25.01	Penyusunan Kebijakan dan Standar Informasi Publik	Pendukung
229	NTX 25.02	Akuisisi dan Analisis Informasi Publik	Pendukung
230	NTX 25.03	Publikasi dan Visualisasi Informasi Publik	Pendukung

No	Kode Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Kategori
231	NTX 25.04	Pelaksanaan Layanan Akses dan Permintaan Informasi Publik	Pendukung
232	NTX 25.05	Pelaporan dan Pertanggungjawaban Layanan Informasi Publik	Pendukung
233	NTX 26	Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pendukung
234	NTX 26.01	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi dalam SPBE	Pendukung
235	NTX 26.02	Penyelenggaraan Akses dan Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam SPBE	Pendukung
236	NTX 26.03	Penyelenggaraan Keamanan Informasi dan Persandian dalam SPBE	Pendukung
237	NTX 26.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Aplikasi SPBE	Pendukung
238	NTX 26.05	Pengelolaan dan Pelaksanaan Integrasi Data SPBE	Pendukung
239	NTX 26.06	Penyelenggaraan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam SPBE	Pendukung
240	NTX 26.07	Penyelenggaraan Pengembangan SDM TIK dalam SPBE	Pendukung
241	NTX 26.08	Penilaian Kinerja dan Audit TIK SPBE	Pendukung

1.2 KATALOG AKTOR

Berikut merupakan katalog aktor Kabupaten Natuna :

Tabel 1. 2 Katalog Aktor

No	Kode	Aktor Pelaksana	Deskripsi
1.	Pemda	Pemerintah Daerah	Adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom
2.	DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Adalah Lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
3.	KDH	Kepala Daerah	Adalah Gubernur untuk provinsi, Bupati untuk Kabupaten, walikota kota untuk Kota

No	Kode	Aktor Pelaksana	Deskripsi
4.	BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
5.	BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Adalah unsur pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6.	KL Teknis	KL Teknis	Adalah unsur pelaksana pemerintah daerah, daerah dapat berarti provinsi, kabupaten atau kota
7.	BPK	Badan Pemeriksa Keuangan	Adalah unsur pemerintahan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
8.	BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Adalah unsur pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional
9.	KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi	Adalah unsur pemerintahan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi
10.	Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri	Adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
11.	Kemenkeu	Kementerian Keuangan	Adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
12.	Pemdes	Pemerintah Desa	Adalah unsur perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
13.	PD	Perangkat Daerah	adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan

No	Kode	Aktor Pelaksana	Deskripsi
			Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
14.	TAPD	Tim Anggaran Pemerintah Daerah	adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD
15.	SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah	adalah Unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah
16.	SKPKD	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	Adalah unsur penunjang Urusan pemerintahan Daerah [ada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah
17.		Bidang Pendapatan	adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia
18.	OPD	Bidang Organisasi Perangkat Daerah	adalah Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa
19.		Kasubag Perencanaan/Kasubag Program/Kasubag Keuangan	adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu
20.	SKPD PA	SKPD Pengguna Anggaran	adalah instansi, organisasi masyarakat, atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas
21.	APIP	Aparat Pengawas Internal Pemerintah /Inspektorat	adalah tim yang menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya swakelola.
22.	PPKD	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah

No	Kode	Aktor Pelaksana	Deskripsi
23.	PA	Pengguna Anggaran	adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya
24.		Kuasa BUD	adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
25.	BUD	Bendahara Umum Daerah	adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD
26.		Bendahara	Adalah pejabat yang membantu kepala daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan
27.	PPTK	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya
28.		Bidang Pendanaan dan Penetapan	Adalah bidang yang mengatur tentang pendanaan dan pendapatan daerah
29.		Kepala SKPD	Adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
30.		Petugas Pemungut	Adalah pejabat yang bertugas memungut penagihan
31.	BPP	Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu	Adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
32.	PPK SKPD	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah	Adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
33.	DPRD BA	DPRD Badan Anggaran	Adalah Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD
34.		Kuasa Pengguna Barang	Adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam

No	Kode	Aktor Pelaksana	Deskripsi
			penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
35.		Pengguna Barang	Adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah
36.		Pengelola Barang	Adalah Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
37.		Tim Penilai	Adalah tim yang ditetapkan gubernur/bupati/walikota sebagai panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari SKPD/unit Kerja Terkait

1.3 PETA PROSES BISNIS

Peta Proses Bisnis Kabupaten Natuna diturunkan dari RPJMD tahun 2021-2026.

Peta proses bisnis memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen dan proses bisnis pendukung.

1. Proses bisnis utama

Proses bisnis utama merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses utama memiliki kriteria sebagai berikut :

- Berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah
- Berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi dan strategi organisasi; dan

2. Proses Manajemen

Proses manajemen adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses utama berjalan baik.

Proses manajemen memiliki kriteria sebagai berikut :

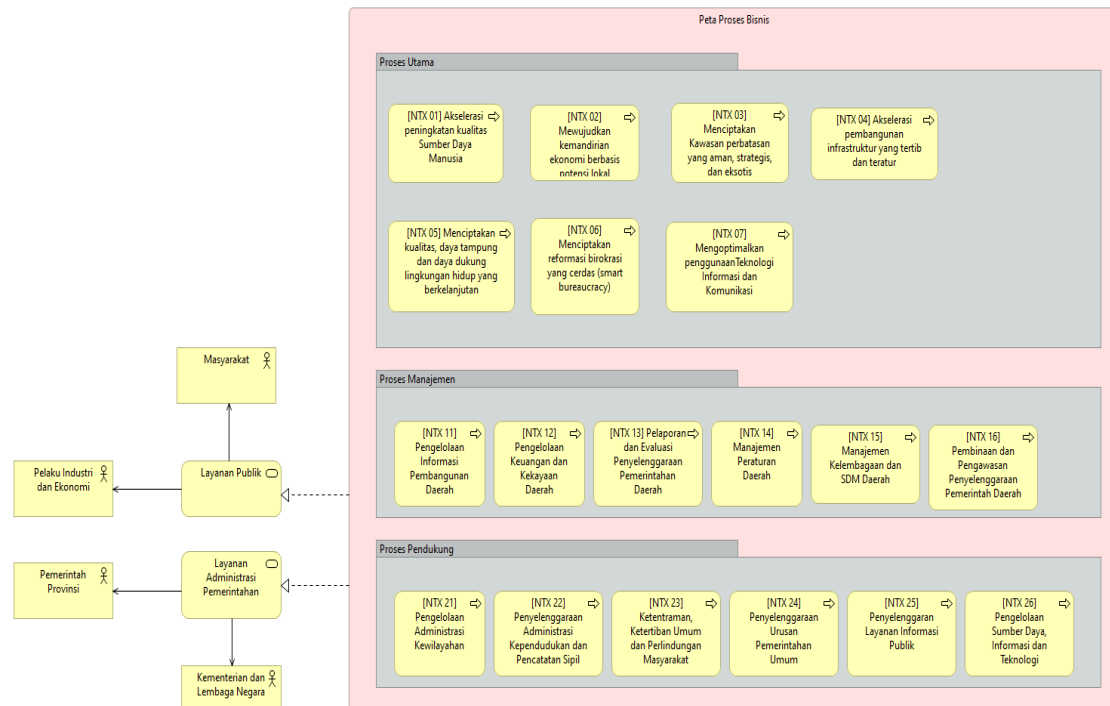
- Memenuhi kebutuhan pengguna internal; dan
- Memberikan dukungan atas aktivitas pada proses utama.

3. Proses Pendukung

Proses pendukung adalah proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses utama namun menghasilkan nilai dan manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal.

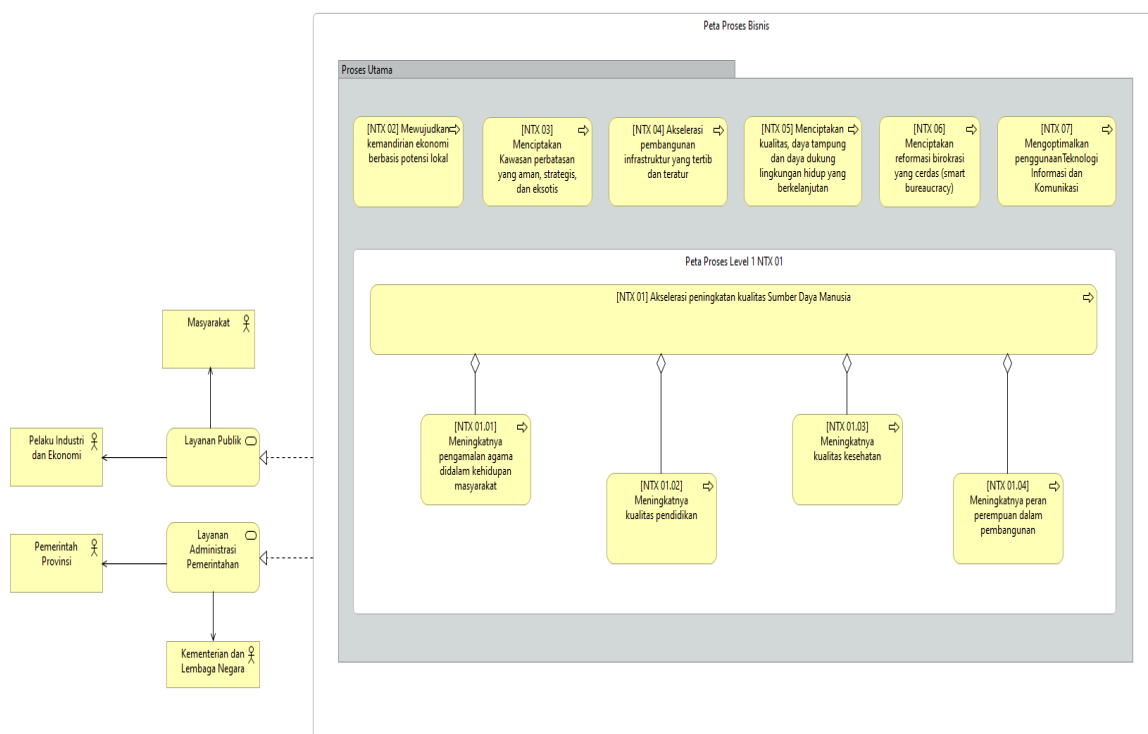
Proses pendukung memiliki kriteria yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal.

A. Peta Proses Bisnis Level 0



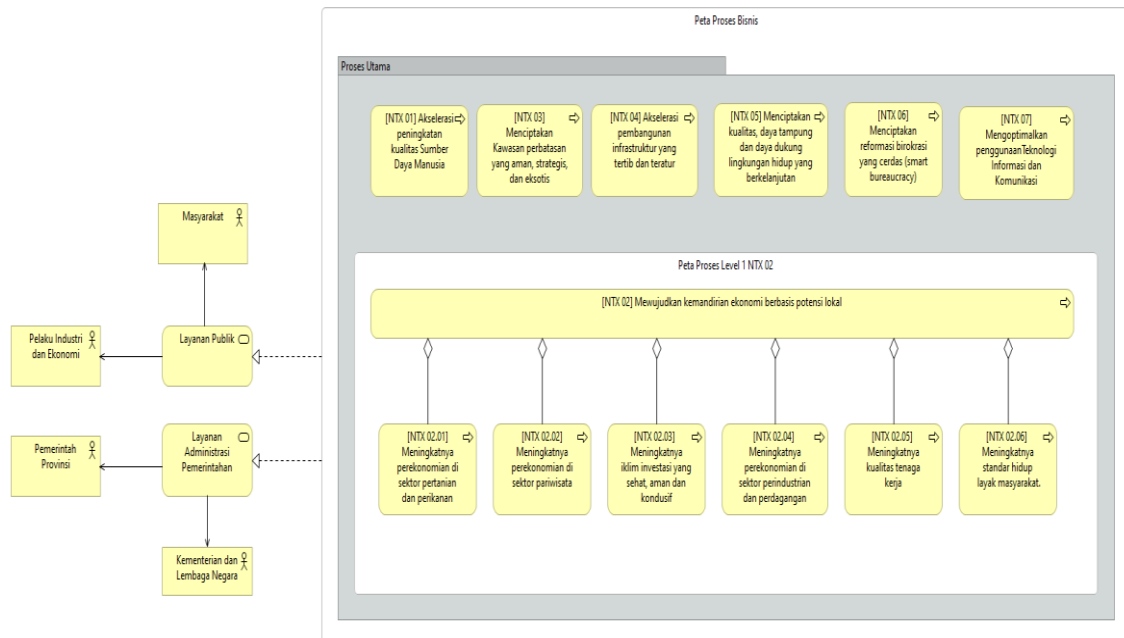
Gambar 1. 1 Peta Proses Bisnis Level 0

B. Peta Proses Bisnis Level 1 – NTX 01



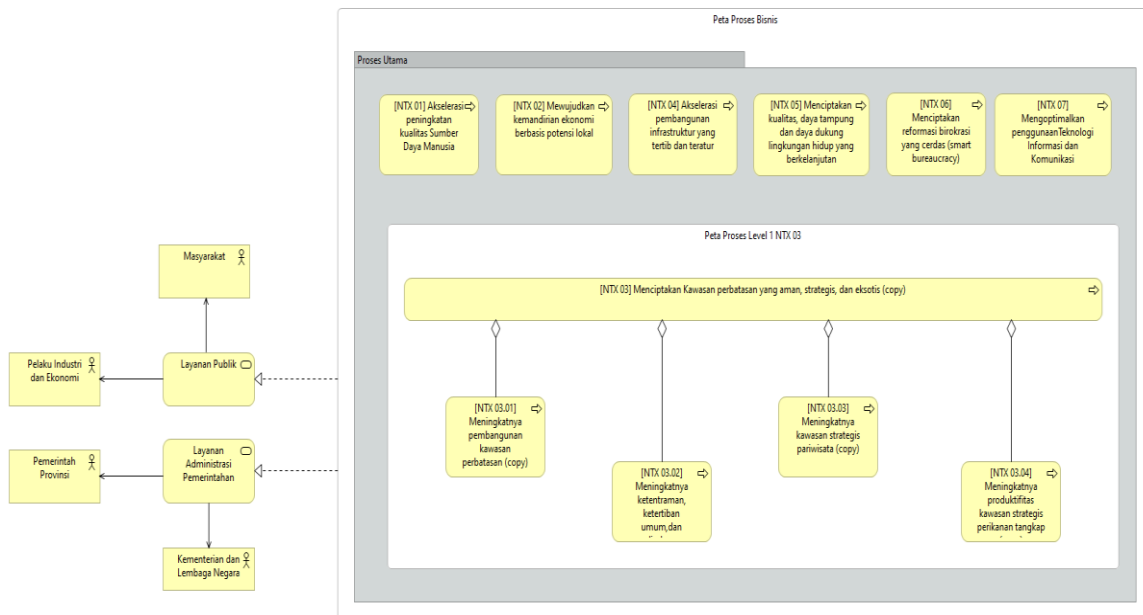
Gambar 1. 2 Peta Proses Bisnis Level 1 – NTX 01

C. Peta Proses Bisnis Level 1 – NTX 02



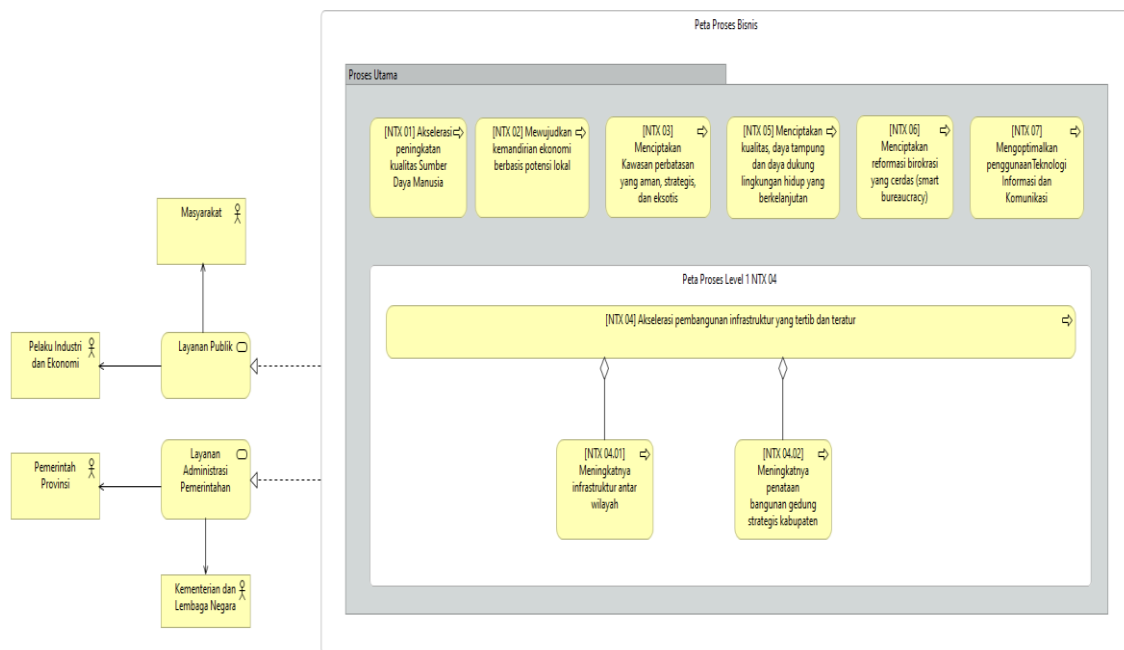
Gambar 1. 3 Peta Proses Bisnis Level 1 – NTX 02

D. Peta Proses Bisnis Level 1 – NTX 03



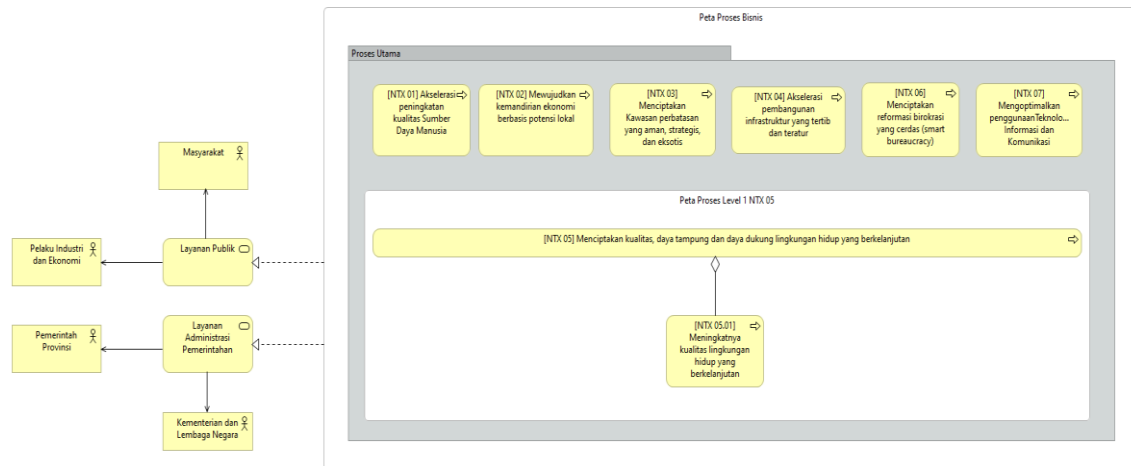
Gambar 1. 4 Peta Proses Bisnis Level 1 – NTX 03

E. Peta Proses Bisnis Level 1 – NTX 04



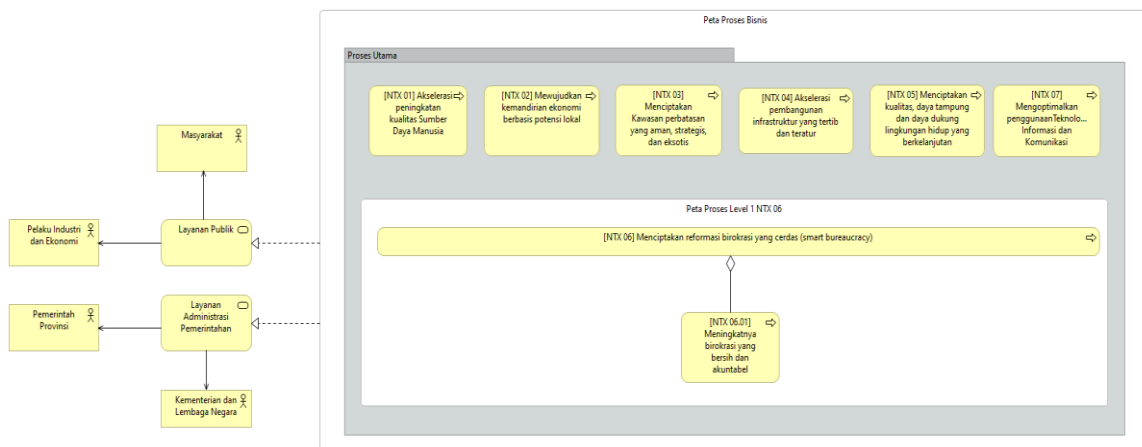
Gambar 1. 5 Peta Proses Bisnis Level 1 – NTX 04

F. Peta Proses Bisnis Level 1 – NTX 05



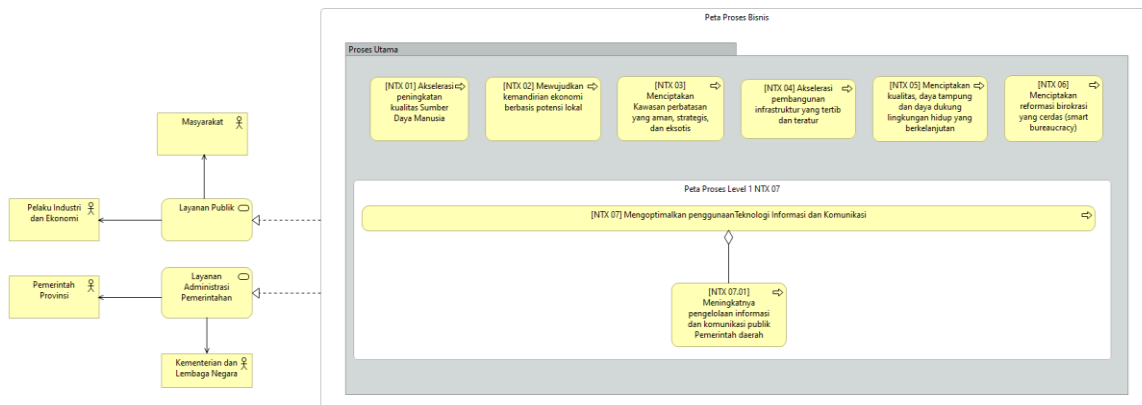
Gambar 1. 6 Peta Proses Bisnis Level 1 – NTX 05

G. Peta Proses Bisnis Level 1 – NTX 06



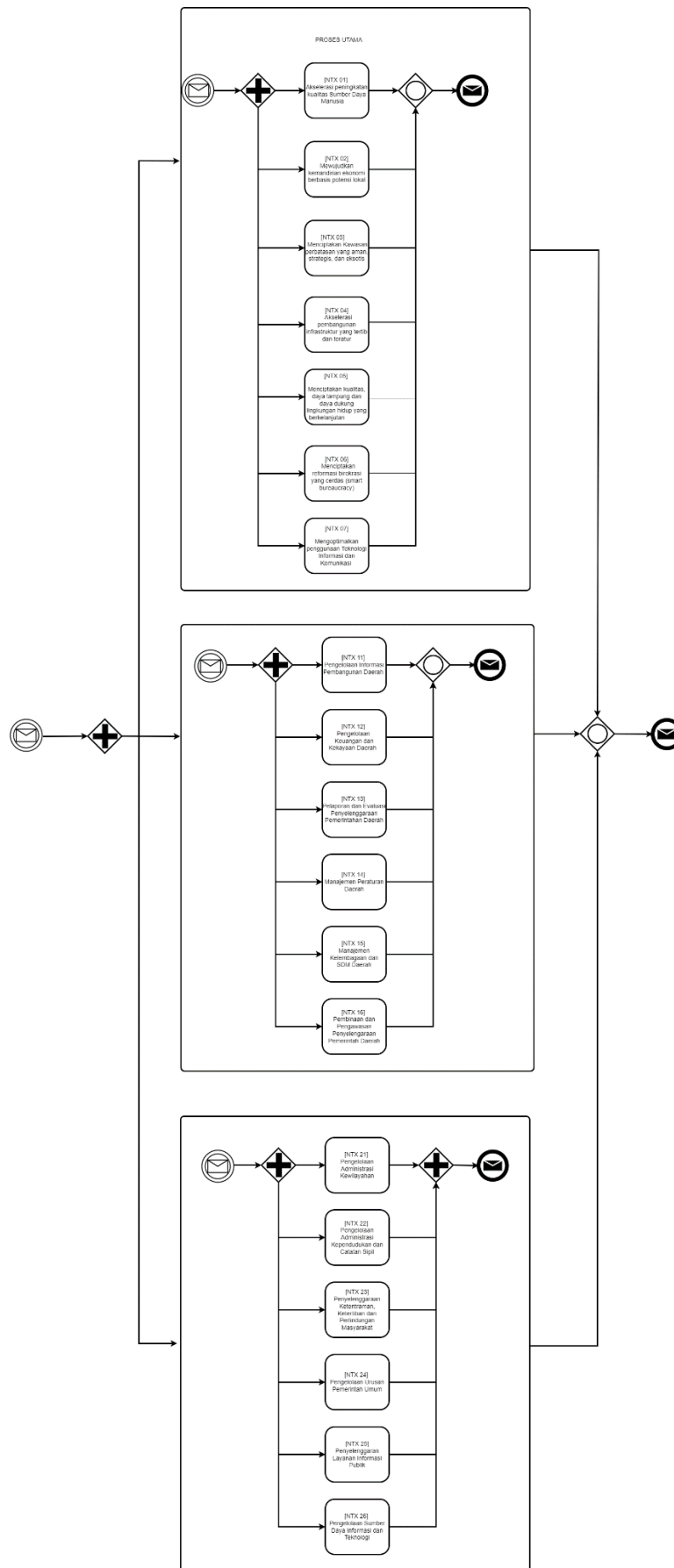
Gambar 1. 7 Peta Proses Bisnis Level 1 – NTX 06

H. Peta Proses Bisnis Level 1 – NTX 07

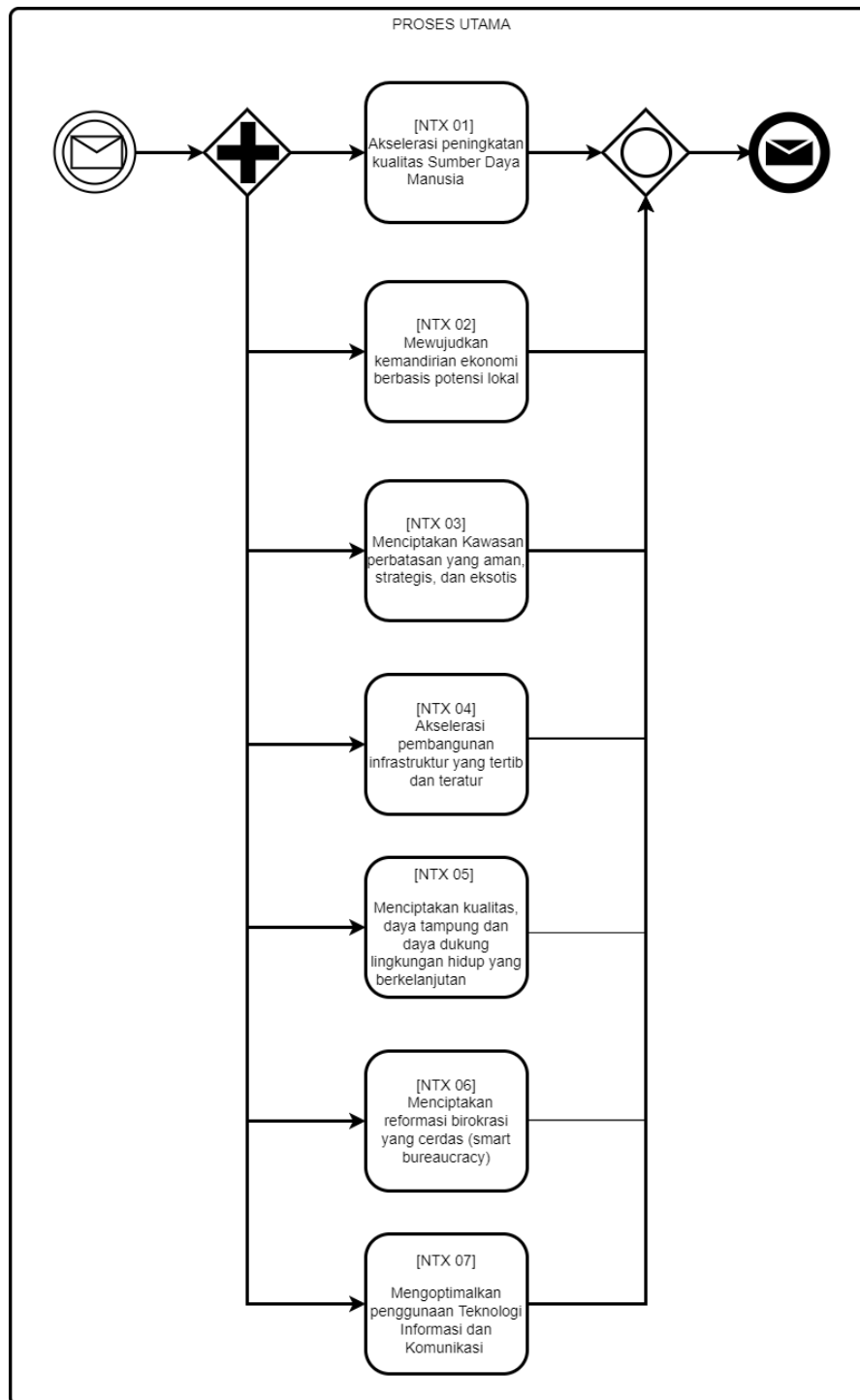


Gambar 1. 8 Peta Proses Bisnis Level 1 – NTX 07

1.4 PEMODELAN PROSES BISNIS

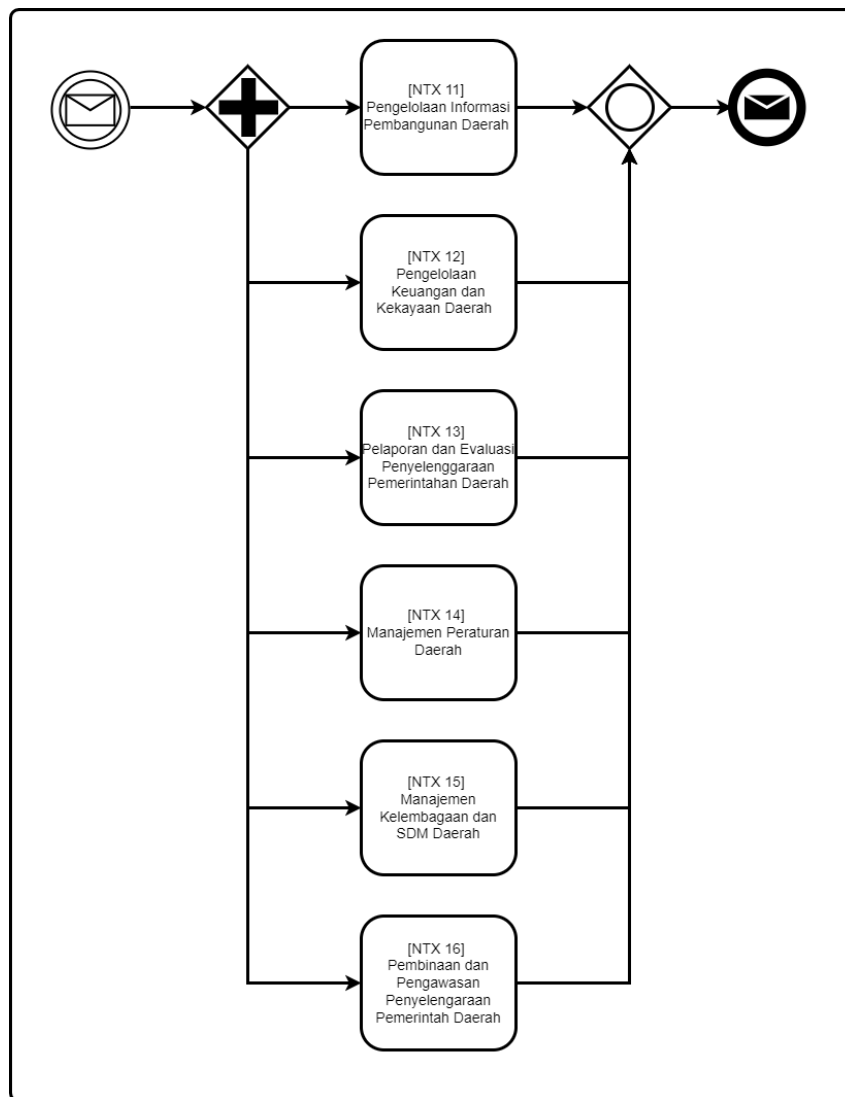


1.4.1. PROSES BISNIS UTAMA



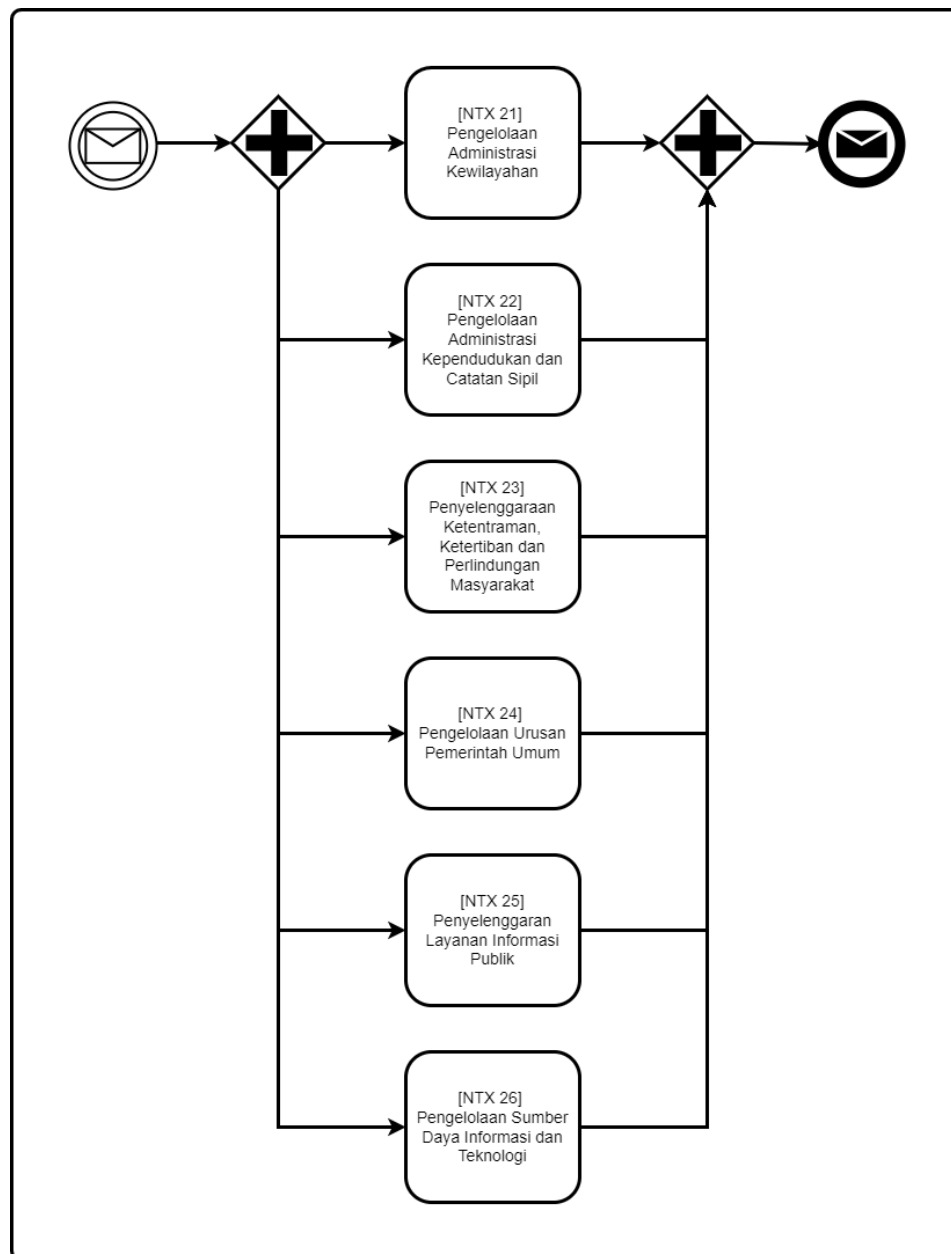
Gambar 1. 9 Proses Bisnis Utama

1.4.2. PROSES BISNIS MANAJERIAL



Gambar 1. 10 Proses Bisnis Manajerial

1.4.3. PETA BISNIS PENDUKUNG



Gambar 1. 11 Proses Bisnis Pendukung

1.5 PETA LINTAS FUNGSI

Tabel 1. 3 Peta Lintas Fungsi

Arah Kebijakan	Pertahanan	urusan luar negeri	industri	perdagangan	pertanian	perkebunan	peternakan	perikanan	badan usaha milik negara	investasi	koperasi	usaha kecil dan menengah	pariwisata	pekerjaan umum	transmigrasi	transportasi	perumahan	pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	pertanahan	kependudukan	kesehatan	sosial	pemberdayaan perempuan	hukum	keamanan
Menjadikan Natuna Gerbang Utaraku sebagai Islamic Center																									
Peningkatan Pembinaan TPQ/TPA/MDA dan Pemenuhan koordinasi di bidang keagamaan																									
Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah																									
Pengembangan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat																									
Pengelolaan/pelestarian situs dan kawasan cagar budaya																									
Peningkatan partisipasi sekolah jenjang PAUD, SD dan SMP																									
Peningkatan dan pemerataan sarana prasarana pendidikan																									

Arah Kebijakan	Pertahanan	urusan luar negeri	industri	perdagangan	pertanian	perkebunan	peterernakan	perikanan	badan usaha milik negara	investasi	koperasi	usaha kecil dan menengah	pariwisata	pekerjaan umum	transmigrasi	transportasi	perumahan	pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	pertanahan	kependudukan	kesehatan	sosial	pemberdayaan perempuan	hukum	keamanan
Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan																									
Pengembangan budaya gemar membaca melalui pengembangan perbukuan dan konten literasi																									
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan perpustakaan																									
Menjamin layanan Kesehatan masyarakat dalam penanganan dan pemulihan kesehatan akibat covid 19																									
Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia kesehatan																									
Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan																									

Arah Kebijakan	Pertahanan	urusan luar negeri	industri	perdagangan	pertanian	perkebunan	peterernakan	perikanan	badan usaha milik negara	investasi	koperasi	usaha kecil dan menengah	pariwisata	pekerjaan umum	transmigrasi	transportasi	perumahan	pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	pertanahan	kependudukan	kesehatan	sosial	pemberdayaan perempuan	hukum	keamanan
Penguatan sarana prasarana dan alat kesehatan pada semua tingkatan pelayanan kesehatan																									
Penguatan peran serta masyarakat dan keluarga secara aktif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan penurunan prevalensi stunting																									
Peningkatan peran, partisipasi dan akses perempuan dalam pembangunan																									

Arah Kebijakan	Pertahanan	urusan luar negeri	industri	perdagangan	pertanian	perkebunan	peterernakan	perikanan	badan usaha milik negara	investasi	koperasi	usaha kecil dan menengah	pariwisata	pekerjaan umum	transmigrasi	transportasi	perumahan	pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	pertanahan	kependudukan	kesehatan	sosial	pemberdayaan perempuan	hukum	keamanan
Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) serta penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Responsif Anak																									
Penguatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan responsif anak																									
Pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak																									

Arah Kebijakan	Pertahanan	urusan luar negeri	industri	perdagangan	pertanian	perkebunan	peterernakan	perikanan	badan usaha milik negara	investasi	koperasi	usaha kecil dan menengah	pariwisata	pekerjaan umum	transmigrasi	transportasi	perumahan	pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	pertanahan	kependudukan	kesehatan	sosial	pemberdayaan perempuan	hukum	keamanan
Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan layanan rehabilitasi bagi anak korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus																									
Peningkatan sarana dan prasarana sektor pertanian dan perikanan																									
Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan																									
Peningkatan kualitas sumber daya petani dan nelayan																									
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan sektor pertanian dan perikanan																									

Arah Kebijakan	Pertahanan	urusan luar negeri	industri	perdagangan	pertanian	perkebunan	peterernakan	perikanan	badan usaha milik negara	investasi	koperasi	usaha kecil dan menengah	pariwisata	pekerjaan umum	transmigrasi	transportasi	perumahan	pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	pertanahan	kependudukan	kesehatan	sosial	pemberdayaan perempuan	hukum	keamanan
Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan																									
Peningkatan sarana dan prasarana sektor pariwisata																									
Peningkatan sumber daya manusia sektor pariwisata																									
Pemberdayaan ekonomi masyarakat																									
Pengembangan pariwisata unggulan berbasis potensi lokal																									
Menggiatkan ekonomi kreatif																									
Penyederhanaan mekanisme perizinan dalam investasi dan penanaman modal																									
Pemberian kemudahan berusaha dan berinvestasi																									
Peningkatan Promosi Potensi dan Nilai Ekonomi Daerah																									

Arah Kebijakan	Pertahanan	urusan luar negeri	industri	perdagangan	pertanian	perkebunan	peterernakan	perikanan	badan usaha milik negara	investasi	koperasi	usaha kecil dan menengah	pariwisata	pekerjaan umum	transmigrasi	transportasi	perumahan	pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	pertanahan	kependudukan	kesehatan	sosial	pemberdayaan perempuan	hukum	keamanan
Pemberian kemudahan bagi Masyarakat yang ingin membuka UMKM untuk meningkatkan geliat entrepreneur																									
Memasarkan Hasil Produk Lokal ke pasar internasional																									
Melakukan penataan pasar tradisional																									
Pemberian pelatihan bagi para tenaga kerja																									
Meningkatkan skill tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar																									
Menjalin kerjasama dengan dunia usaha																									
Penyediaan informasi kebutuhan tenaga kerja																									
Peningkatan program pemberdayaan masyarakat																									
Peningkatan program pemberdayaan sosial																									

Arah Kebijakan	Pertahanan	urusan luar negeri	industri	perdagangan	pertanian	perkebunan	peterernakan	perikanan	badan usaha milik negara	investasi	koperasi	usaha kecil dan menengah	pariwisata	pekerjaan umum	transmigrasi	transportasi	perumahan	pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	pertanahan	kependudukan	kesehatan	sosial	pemberdayaan perempuan	hukum	keamanan
Peningkatan keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya pada kawasan perbatasan																									
Percepatan tumbuhnya destinasi-destinasi wisata eksotis																									
Optimalisasi Pembangunan Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan																									
Peningkatan Pembangunan infrastruktur mendukung kawasan ekonomi berbasis Kepulauan																									
Peningkatan Ketersediaan sarana dan prasarana air baku																									
Peningkatan rumah layak huni																									

Arah Kebijakan	Pertahanan	urusan luar negeri	industri	perdagangan	pertanian	perkebunan	peterernakan	perikanan	badan usaha milik negara	investasi	koperasi	usaha kecil dan menengah	pariwisata	pekerjaan umum	transmigrasi	transportasi	perumahan	pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	pertanahan	kependudukan	kesehatan	sosial	pemberdayaan perempuan	hukum	keamanan
Memperkuat konektivitas antar wilayah melalui sistem transportasi yang efisien dan efektif																									
Peningkatan penataan bangunan gedung pemerintahan																									
Peningkatan sarana prasarana dan pengelolaan persampahan																									
Peningkatan konservasi hutan dan sumber air																									
Optimalisasi pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup																									
Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah																									
Peningkatan kualitas kompetensi sumber daya aparatur																									
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik																									

Arah Kebijakan	Pertahanan	urusan luar negeri	industri	perdagangan	pertanian	perkebunan	peterernakan	perikanan	badan usaha milik negara	investasi	koperasi	usaha kecil dan menengah	pariwisata	pekerjaan umum	transmigrasi	transportasi	perumahan	pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	pertanahan	kependudukan	kesehatan	sosial	pemberdayaan perempuan	hukum	keamanan
Penggunaan teknologi dalam proses pelayanan publik																									
Perbaikan tata kelola kelembagaan dengan seluruh stakeholder																									
Peningkatan data statistik sektoral yang memenuhi standar data, metadana, interoperabilitas dan referensi data																									
Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola statistik sektoral																									
Meningkatkan konektivitas antara pulau dengan menggunakan data digital																									
Meningkatnya Penggunaan Aplikasi di Semua sektor																									

Arah Kebijakan	hak asasi manusia	pendidikan	ketenagakerjaan	ilmu pengetahuan dan teknologi	pemuda	olahraga	pertambangan	energi	kehutanan	kelautan	lingkungan hidup	agama	kebudayaan	dalam negeri	keuangan	informasi	komunikasi	perencanaan pembangunan nasional	aparatur negara	kesekretariatan negara	Ekonomi	Infrastruktur
Menjadikan Natuna Gerbang Utara sebagai Islamic Center																						
Peningkatan Pembinaan TPQ/TPA/MDA dan Pemenuhan koordinasi di bidang keagamaan																						
Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah																						
Pengembangan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat																						
Pengelolaan/pelestarian situs dan kawasan cagar budaya																						
Peningkatan partisipasi sekolah jenjang PAUD, SD dan SMP																						
Peningkatan dan pemerataan sarana prasarana pendidikan																						

Arah Kebijakan	hak asasi manusia	pendidikan	ketenagakerjaan	ilmu pengetahuan dan teknologi	pemuda	olahraga	pertambangan	energi	kehutanan	kelautan	lingkungan hidup	agama	kebudayaan	dalam negeri	keuangan	informasi	komunikasi	perencanaan pembangunan nasional	aparatur negara	kesekretariatan negara	Ekonomi	Infrastruktur
Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan																						
Pengembangan budaya gemar membaca melalui pengembangan perbukuan dan konten literasi																						
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan perpustakaan																						
Menjamin layanan Kesehatan masyarakat dalam penanganan dan pemulihan kesehatan akibat covid 19																						
Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia kesehatan																						
Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan																						

Arah Kebijakan	hak asasi manusia	pendidikan	ketenagakerjaan	ilmu pengetahuan dan teknologi	pemuda	olahraga	pertambangan	energi	kehutanan	kelautan	lingkungan hidup	agama	kebudayaan	dalam negeri	keuangan	informasi	komunikasi	perencanaan pembangunan nasional	aparatur negara	kesekretariatan negara	Ekonomi	Infrastruktur
Penguatan sarana prasarana dan alat kesehatan pada semua tingkatan pelayanan kesehatan																						
Penguatan peran serta masyarakat dan keluarga secara aktif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan penurunan prevalensi stunting																						
Peningkatan peran, partisipasi dan akses perempuan dalam pembangunan																						

Arah Kebijakan	hak asasi manusia	pendidikan	ketenagakerjaan	ilmu pengetahuan dan teknologi	pemuda	olahraga	pertambangan	energi	kehutanan	kelautan	lingkungan hidup	agama	kebudayaan	dalam negeri	keuangan	informasi	komunikasi	perencanaan pembangunan nasional	aparatur negara	kesekretariatan negara	Ekonomi	Infrastruktur
Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) serta penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Responsif Anak																						
Penguatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan responsif anak																						
Pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak																						

Arah Kebijakan	hak asasi manusia	pendidikan	ketenagakerjaan	ilmu pengetahuan dan teknologi	pemuda	olahraga	pertambangan	energi	kehutanan	kelautan	lingkungan hidup	agama	kebudayaan	dalam negeri	keuangan	informasi	komunikasi	perencanaan pembangunan nasional	aparatur negara	kesekretariatan negara	Ekonomi	Infrastruktur
Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan layanan rehabilitasi bagi anak korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus																						
Peningkatan sarana dan prasarana sektor pertanian dan perikanan																						
Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan																						
Peningkatan kualitas sumber daya petani dan nelayan																						
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan sektor pertanian dan perikanan																						

Arah Kebijakan	hak asasi manusia	pendidikan	ketenagakerjaan	ilmu pengetahuan dan teknologi	pemuda	olahraga	pertambangan	energi	kehutanan	kelautan	lingkungan hidup	agama	kebudayaan	dalam negeri	keuangan	informasi	komunikasi	perencanaan pembangunan nasional	aparatur negara	keseekretariatan negara	Ekonomi	Infrastruktur
Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan																						
Peningkatan sarana dan prasarana sektor pariwisata																						
Peningkatan sumber daya manusia sektor pariwisata																						
Pemberdayaan ekonomi masyarakat																						
Pengembangan pariwisata unggulan berbasis potensi lokal																						
Menggiatkan ekonomi kreatif																						
Penyederhanaan mekanisme perizinan dalam investasi dan penanaman modal																						
Pemberian kemudahan berusaha dan berinvestasi																						
Peningkatan Promosi Potensi dan Nilai Ekonomi Daerah																						

Arah Kebijakan	hak asasi manusia	pendidikan	ketenagakerjaan	ilmu pengetahuan dan teknologi	pemuda	olahraga	pertambangan	energi	kehutanan	kelautan	lingkungan hidup	agama	kebudayaan	dalam negeri	keuangan	informasi	komunikasi	perencanaan pembangunan nasional	aparatur negara	kesejahteraan negara	Ekonomi	Infrastruktur
Pemberian kemudahan bagi Masyarakat yang ingin membuka UMKM untuk meningkatkan geliat entrepreneur																						
Memasarkan Hasil Produk Lokal ke pasar internasional																						
Melakukan penataan pasar tradisional																						
Pemberian pelatihan bagi para tenaga kerja																						
Meningkatkan skill tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar																						
Menjalin kerjasama dengan dunia usaha																						
Penyediaan informasi kebutuhan tenaga kerja																						
Peningkatan program pemberdayaan masyarakat																						
Peningkatan program pemberdayaan sosial																						

Arah Kebijakan	hak asasi manusia	pendidikan	ketenagakerjaan	ilmu pengetahuan dan teknologi	pemuda	olahraga	pertambangan	energi	kehutanan	kelautan	lingkungan hidup	agama	kebudayaan	dalam negeri	keuangan	informasi	komunikasi	perencanaan pembangunan nasional	aparatur negara	kesejahteraan negara	Ekonomi	Infrastruktur
Peningkatan keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya pada kawasan perbatasan																						
Percepatan tumbuhnya destinasi-destinasi wisata eksotis																						
Optimalisasi Pembangunan Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan																						
Peningkatan Pembangunan infrastruktur mendukung kawasan ekonomi berbasis Kepulauan																						
Peningkatan Ketersediaan sarana dan prasarana air baku																						
Peningkatan rumah layak huni																						

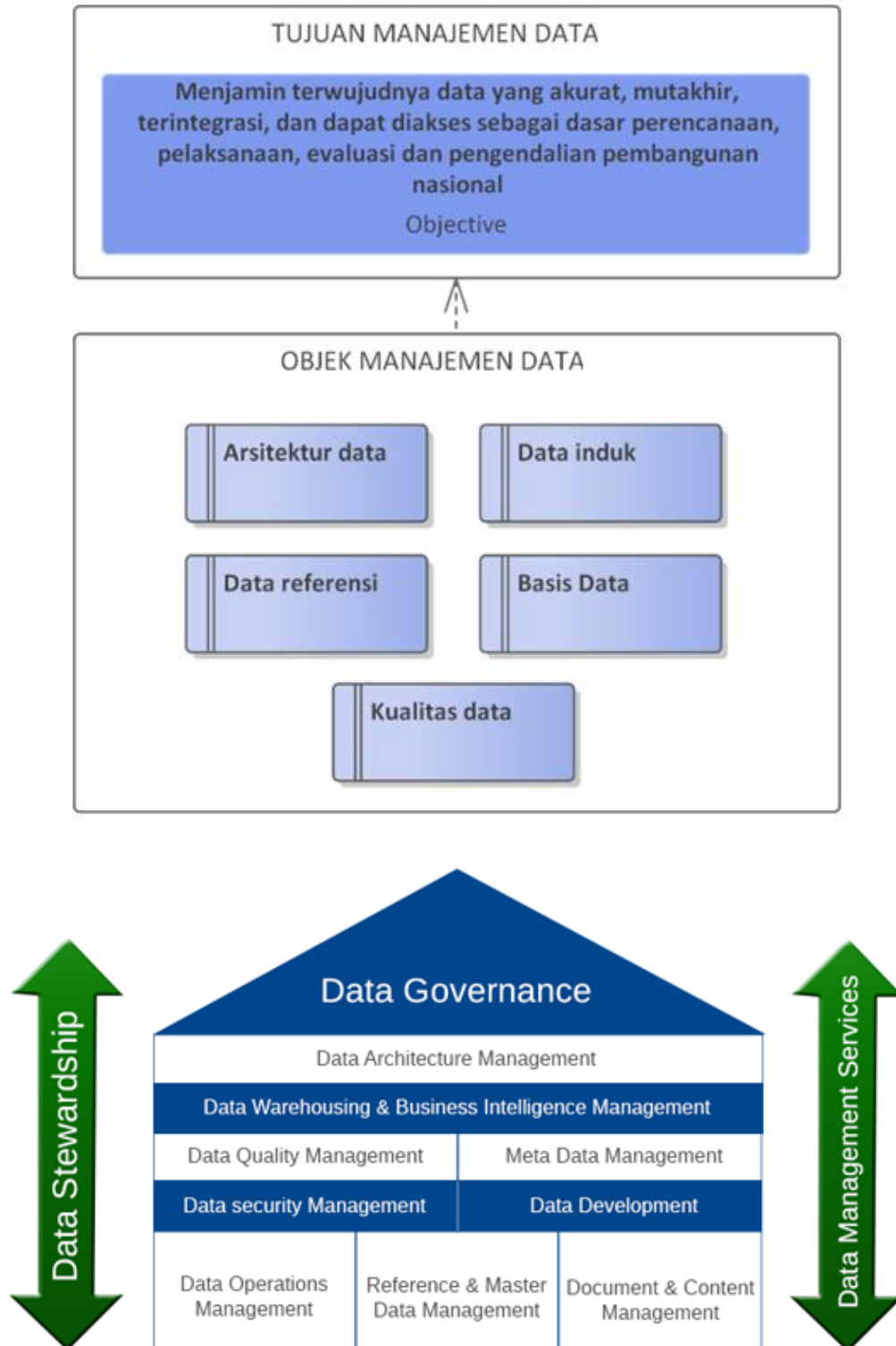
Arah Kebijakan	hak asasi manusia	pendidikan	ketenagakerjaan	ilmu pengetahuan dan teknologi	pemuda	olahraga	pertambangan	energi	kehutanan	kelautan	lingkungan hidup	agama	kebudayaan	dalam negeri	keuangan	informasi	komunikasi	perencanaan pembangunan nasional	aparatur negara	kesejahteraan negara	Ekonomi	Infrastruktur
Memperkuat konektivitas antar wilayah melalui sistem transportasi yang efisien dan efektif																						
Peningkatan penataan bangunan gedung pemerintahan																						
Peningkatan sarana prasarana dan pengelolaan persampahan																						
Peningkatan konservasi hutan dan sumber air																						
Optimalisasi pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup																						
Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah																						
Peningkatan kualitas kompetensi sumber daya aparatur																						
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik																						

Arah Kebijakan	hak asasi manusia	pendidikan	ketenagakerjaan	ilmu pengetahuan dan teknologi	pemuda	olahraga	pertambangan	energi	kehutanan	kelautan	lingkungan hidup	agama	kebudayaan	dalam negeri	keuangan	informasi	komunikasi	perencanaan pembangunan nasional	aparatur negara	kesekretariatan negara	Ekonomi	Infrastruktur
Penggunaan teknologi dalam proses pelayanan publik																						
Perbaikan tata kelola kelembagaan dengan seluruh stakeholder																						
Peningkatan data statistik sektoral yang memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas dan referensi data																						
Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola statistik sektoral																						
Meningkatkan konektivitas antara pulau dengan menggunakan data digital																						
Meningkatnya Penggunaan Aplikasi di Semua sektor																						

BAB II

ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI

2.1 REFERENSI ARSITEKTUR DATA



Gambar 2. 1 Arsitektur Referensi

2.2 ARSITEKTUR DATA

Inventaris Entitas

Pada model Integration Definition (IDEF), tahapan pertama dilakukan inventarisasi entitas pada proses bisnis utama yang telah dibuat. Adapun inventarisasi entitas proses bisnis manajemen dan pendukung ditetapkan kemudian. Adapun hasil inventarisasi entitas yang ada pada proses bisnis utama Pemerintahan Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Inventaris Entitas

No	Nama Entitas	Deskripsi
1	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri secara data adalah nilai dari Entitas Data Kementerian dan Lembaga dengan RAD 09.01.21
2	Pemerintah Daerah	Entitas Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3	Perangkat Daerah	Entitas Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah
4	Kementerian/Lembaga	Entitas Kementerian/Lembaga Negara adalah departemen atau divisi dari Pemerintah Negara. Setiap kementerian/Lembaga Negara adalah bagian fungsional dari pemerintah yang memiliki orang yang bertanggung jawab (menteri). Otoritas tertinggi, yaitu, yang bertanggung jawab atas para menteri, adalah Presiden Pemerintah.
5	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)	BAPPENAS adalah datum dari Entitas Data RAD 09.01.21 Kementerian dan Lembaga
6	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Entitas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri
7	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Entitas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

No	Nama Entitas	Deskripsi
8	Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Entitas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP, adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan
9	Informasi Pembangunan Daerah	Entitas sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan daerah
10	Penganggaran Keuangan Daerah	Entitas penyusunan rencana keuangan daerah
11	Penatausahaan Keuangan Daerah	Entitas kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan daerah
12	Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah	Entitas kegiatan standar akuntansi pemerintahan dan mengakomodasi arsitektur pengelolaan keuangan daerah
13	Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Entitas Peraturan berisi pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaan APBD
14	Barang Milik Daerah (BMD)	Entitas barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
15	Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Entitas kegiatan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah
16	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Entitas badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah
17	Pajak dan Retribusi	Entitas kegiatan – kegiatan dalam aktivitas pajak dan retribusi
18	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Entitas laporan yang memuat capaian kerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1(satu) tahun anggaran
19	Peraturan Daerah (Perda)	Entitas peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota
20	Kelembagaan dan SDM Daerah	Entitas kegiatan-kegiatan dalam kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia daerah
21	SPBE Pemerintah Daerah	Entitas kegiatan penyelenggaran pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi memberikan layanan
22	KUA	Entitas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sebagai dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

No	Nama Entitas	Deskripsi
23	PPAS	Entitas PPAS sebagai program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
24	RKA PD	Entitas RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing- masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
25	Rancangan APBD	Entitas Rancangan APBD merupakan rencana pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun. APBD disetujui Pemerintah Daerah (Pemda) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26	APBD	Entitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun. APBD disetujui Pemerintah Daerah (Pemda) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27	Pergeseran Anggaran	Entitas Pergeseran Anggaran adalah Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan, Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan, dan pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan.
28	Perubahan KUA	Entitas Perubahan KUA dan Perubahan PPAS adalah kegiatan untuk melakukan perubahan terhadap KUA dan PPAS
29	Perubahan PPAS	Entitas Perubahan KUA dan Perubahan PPAS adalah kegiatan untuk melakukan perubahan terhadap KUA dan PPAS
30	Perubahan APBD	Entitas Perubahan APBD adalah perubahan mengenai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah
31	Penetapan Perubahan APBD	Entitas yang melakukan penetapan dan melakukan perubahan APBD
32	Manajemen KAS	Entitas Manajemen Kas adalah kegiatan untuk mengelola, mengatur membiayai kegiatan umum Daerah
33	Keuangan Daerah Penerimaan	Entitas penerimaan daerah adalah semua uang yang masuk ke kas Daerah. Penerimaan daerah terdiri atas: Pendapatan Daerah; dan. Penerimaan Pembiayaan daerah
34	DPA SKPD	Entitas Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) Adalah dokumen yang memuat pendapatan dan

No	Nama Entitas	Deskripsi
		belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
35	Penyusunan DPA SKPD	Entitas Sistem untuk Penyusunan DPA SKPD
36	Anggaran SKPD	Entitas Sistem yang menguraikan anggaran pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
37	Penyusunan Anggaran SKPD	Entitas Pelaksanaan Penyusuna Anggaran SKPD
38	Pendapatan	Entitas Pendapatan adalah segala sesuatu yang didapat dari hasil usaha. Pendapatan merupakan jumlah seluruh uang yang diterima oleh pemerintah Daerah selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
39	Penatausahaan Pendapatan	Entitas Penatausahaan pendapatan adalah kegiatan yang terdiri pembukuan, pendataan, pencatatan serta pelaporan terkait pendapatan
40	Penerimaan Pembayaran	Entitas Penerimaan Pembayaran adalah salah satu bentuk penerimaan pendapatan dari mekanisme pembayaran
41	Penatausahaan Penerimaan Pembayaran	Entitas Penatausahaan Penerimaan Pembayaran adalah kegiatan yang terdiri pembukuan, pendataan, pencatatan serta pelaporan terkait Penerimaan Pembayaran
42	Surat Penyediaan Dana (SPD)	Entitas Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan
43	Penerbitan SPD	Entitas Penerbitan SPD adalah kegiatan pencatatan, penetapan dan penyerahan bukti telah dilakukan untuk terbitnya SPD
44	Belanja	Entitas Belanja aktivitas pemilihan dan/atau pembelian kebutuhan operasional pemerintah daerah
45	Penatausahaan Belanja	Entitas Penatausahaan Belanja adalah kegiatan yang terdiri pembukuan, pendataan, pencatatan serta pelaporan terkait Belanja
46	Pembiayaan	Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil
47	Penatausahaan Pembiayaan	Entitas Penatausahaan Pembiayaan adalah kegiatan yang terdiri pembukuan, pendataan, pencatatan serta pelaporan terkait Pembiayaan
48	Keuangan Daerah Pengeluaran	Entitas Pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah pada periode tahun tertentu yang menjadi beban daerah. Pada dasarnya pengeluaran daerah dapat diperinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja

No	Nama Entitas	Deskripsi
49	Anggaran	Entitas Anggaran adalah suatu rancangan yang disajikan dalam bentuk angka dan disusun secara sistematis mengenai keseluruhan kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu di masa mendatang
50	Realisasi Anggaran	Entitas Realisasi Anggaran adalah usaha merealisasikan dan melaksanakan Anggaran
51	Laporan Realisasi Anggaran	Entitas LRA (Laporan Realisasi Anggaran) adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun.
52	LRA Semester 1	Entitas LRA Semester 1 adalah LRA yang diterbitkan pada semester 1 tahun anggaran berjalan
53	LRA Prognosis	Entitas LRA Prognosis adalah LRA yang diterbitkan pada semester 2 tahun anggaran berjalan
54	LRA Periodik	Entitas LRA periodik adalah LRA yang diterbitkan secara rutin dengan siklus waktu tetap
55	Saldo Anggaran Lebih	Entitas Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
56	Laporan Operasional	Entitas Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
57	Laporan Perubahan Ekuitas	Entitas Laporan perubahan ekuitas adalah merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut.
58	Neraca	Entitas Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah.
59	Arus Kas	Entitas Arus kas atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama Cash Flow adalah kenaikan atau penurunan jumlah uang yang dimiliki bisnis, institusi, atau individu
60	Laporan Arus Kas	Entitas Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.

No	Nama Entitas	Deskripsi
61	Laporan Keuangan	Entitas dokumen atau catatan tertulis yang menyampaikan atau kegiatan bisnis dan kinerja keuangan
62	Catatan Atas Laporan Keuangan	Entitas Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.
63	Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Entitas yang mengatur Peraturan daerah dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD.
64	Peraturan Kepala Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Entitas yang, mengatur Peraturan Kepala Daerah mengenai Petanggung Jawaban Pelaksanaan APBD
65	BMD	Entitas Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
66	Pembukuan BMD	Entitas kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMD ke dalam daftar barang yang ada pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang atau Pengelola Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
67	Inventarisasi BMD	Entitas kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD.
68	Pelaporan BMD	Entitas serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh Pengurus Barang Pembantu, Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pengelola yang melakukan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang atau Pengelola Barang.
69	BLUD	Entitas BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah.
70	Pengelolaan Barang oleh BLUD	Entitas pengelolaan barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
71	Perencanaan BLUD	Entitas Perencanaan adalah upaya untuk mencapai tujuan dan menentukan tahapan untuk mencapai tujuan Badan Layanan Umum Daerah
72	Penganggaran BLUD	Entitas Penganggaran BLUD merupakan rencana jangka pendek satu tahunan sebagai implementasi rencana jangka panjang lima tahunan yang tertuang dalam dokumen RSB.

No	Nama Entitas	Deskripsi
73	Penatausahaan Keuangan BLUD	Entitas Panatausaan Kauangan BLUD merupakan aktivitas untuk menerima, menyimpan menyetorkan/membayara, menstausahkan dan mempertanggung jawabkan penerimaan, pendapatan, pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah
74	KAS BLUD	Entitas Kas BLUD adalah entitas pelaksanaan manajemen keungan untuk pengelolaan dana masuk dan keluar dari dan ke BLUD
75	Utang Piutang BLUD	Entitas Utang Piutang BLUD adalah pencatatan transaksi Utang dan Piutang BLUD
76	Investasi BLUD	Entitas Investasi BLUD adalah upaya pencatatan transaksi investasi yang dilakukan oleh BLUD
77	Akuntansi BLUD	Entitas Akuntansi BLUD adalah Sistem Pencatatan Transaksi Keuangan untuk BLUD
78	Laporan Pertanggungjawaban BLUD	Entitas laporan pertanggungjawaban adalah sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan. Nantinya, hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan atau peningkatan kualitas kegiatan di masa mendatang.
79	BUMD	Entitas BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan organisasi yang memiliki status korporat yang independen, dipimpin oleh dewan direksi yang ditunjuk oleh pejabat pemerintah daerah dengan kepemilikan mayoritas publik.
80	Profil BUMD	Entitas Profil BUMD merupakan organisasi yang memiliki status korporat yang independen, dipimpin oleh dewan direksi yang ditunjuk oleh pejabat pemerintah daerah dengan kepemilikan mayoritas publik.
81	Laporan Keuangan	Entitas laporan keuangan daerah adalah laporan yang testruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
82	Kebijakan Pajak dan Retribusi	Entitas Kebijakan Pajak dan Retribusi adalah suatu panduan umum dan teknis yang mengikat secara hukum pada satuan kerja di pemerintah daerah
83	Pajak	Entitas Pajak merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.
84	Retribusi	Entitas Retribusi adalah pungutan yang harus dibayarkan oleh pengguna fasilitas kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat menggunakan fasilitas tersebut.

No	Nama Entitas	Deskripsi
85	Pengelolaan Kebijakan Pajak dan Retribusi	Entitas Kebijakan Pajak Dan retribusi adakah cara pemerintah daerah dlam mengelolaa perpajakan yang harus dibayarkan oleh pengguna pasilitas kepada pemilik.
86	LPPD	Entitas LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat
87	LKPJ	Entitas Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) adalah laporan berupa informasi penyelenggara pemerintahan selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD
88	RLPD	Entitas Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran
89	Tim Penyusun	Entitas Pembentukan tim dalam pemerintah daerah merupakan salah satu proses untuk mendukung terlaksananya strategi pemerintah daerah.
90	Data Dasar Penyusunan	Entitas Pengumpulan Data merupakan kegiatan untuk mencari data yang di butuhkan dalam mencapai suatu tujuan.
91	Informasi Capaian Kerja	Entitas Dokumen data dan dasar capaian kerja
92	Verifikasi Data Dasar	Entitas Verifikasi Data dasar
93	Penilaian dokumen Data Dasar	Entitas Verifikasi dan penilaian Dokumen Data Dasar dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk reviu, yang merupakan bentuk penelahaan ulang bukti-bukti kegiatan untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan
94	Penyusunan LPPD	Entitas proses penyusunan LPPD
95	Penyampaian LPPD	Entitas Penyusunan & Penyampaian LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun, Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.
96	Penyusunan LKPD	Entitas proses penyusunan LKPD

No	Nama Entitas	Deskripsi
97	Penyampaian LKPD	Entitas Penyusunan & Penyampaian Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) adalah laporan berupa informasi penyelenggara pemerintahan selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD. Terdapat hal yang perlu diketahui terkait LKPJ.
98	Penyusunan RLPPD	Entitas proses penyusunan RLPPD
99	Penyampaian RLPPD	Entitas Penyusunan & Penyampaian RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
100	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi	Entitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, kecuali urusan pemerintahan Yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah dilaksanakan melalui asas dekonsentrasi.
101	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota	Entitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten dan kota
102	Hasil Evaluasi Penyelenggaraan	Entitas Hasil Evaluasi adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan atau dihentikan.
103	Tindaklanjut Hasil Evaluasi Penyelenggaraan	Entitas Tindak Lanjut hasil Evaluasi adalah kegiatan untuk memonitor hasil evaluasi
104	Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah	Entitas Perencanaan Penyusunan Peraturan daerah peraturan daerah (perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka Pembinaan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
105	Penyusunan SK Kepala Daerah	Entitas penyusunan SK Kepala Daerah

No	Nama Entitas	Deskripsi
106	Pembahasan SK Kepala Daerah	Entitas Penyusunan & Pembahasan Produk Hukum Pentapan Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkada, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.
107	Penyusunan Produk Hukum Peraturan Kepala Daerah	Penyusunan Produk Hukum Peraturan Kepala Daerah adalah aktivitas perancangan, dan penetapan Produk Hukum Peraturan Kepala Daerah
108	Pembahasan Produk Hukum Peraturan Kepala Daerah	Entitas yang Mengatur Penyusunan & dan pembahasan setiap putusan, ketetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya.
109	Penyusunan Produk Hukum Peraturan	Penyusunan Produk Hukum Peraturan Daerah adalah aktivitas perancangan, dan penetapan Produk Hukum Peraturan Daerah
110	Pembahasan Produk Hukum Peraturan	Entitas Penyusunann dan Pembahasan produk hukum pemerintah Daerah
111	Register Produk Hukum	Entitas yang menyimpan data sementara mengenai produk Hukum
112	Penetapan Penomoran Pengundangan dan Autentifikasi	Entitas Pembatalan peraturan daerah harus dilakukan melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Agung
113	Penataan Perangkat Daerah	Penataan perangkat daerah sendiri ialah kebijakan pemerintah dalam menata kembali tatanan birokrasi di pemerintahan daerah. Penataan dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah pekerjaan yang serumpun
114	Pembentukan Perangkat Daerah	Pembentukan Perangkat Daerah adalah upaya perancangan dan penetapan Pembentukan Perangkat Daerah
115	Evaluasi Perangkat Daerah	Entitas penataan, Pembentukan dan evaluasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
116	Kinerja SPBE Pemerintah Daerah	Kinerja SPBE Pemerintah Daerah adalah prestasi pelaksanaan pekerjaan SPBE Pemerintah Daerah
117	Peningkatan Kinerja SPBE Pemerintah Daerah	Peningkatan Kinerja SPBE Pemerintah Daerah adalah upaya yang disusun secara terstruktur dan sistemik dalam meningkatkan kinerja SPBE

No	Nama Entitas	Deskripsi
118	Pembinaan Peningkatan Kinerja SPBE Pemerintah Daerah	Entitas pembinaan, peningkatan kinerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE pemerintah Daerah.
119	Fasilitasi Peningkatan Kinerja SPBE Pemerintah Daerah	Entitas Fasilitas SPBE yang Peningkatan Kinerja pemerintah Daerah
120	Indikator Makro Pembangunan Daerah	Entitas indikator makro pembangunan daerah, yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi (%), Angka Kemiskinan (%), Rata-rata Lama Sekolah atau RLS (tahun), Indeks GINI, Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT (%), Angka Harapan Hidup atau AHH (tahun), dan Angka Melek Huruf
121	Gambaran Umum Kondisi Daerah	Entitas Gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman awal tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini, dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah
122	Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah	Entitas Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
123	Informasi Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah	Entitas Informasi Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu set informasi yang terdiri dari informasi Sektoral Urusan Wajib dan Urusan Pilihan
124	Informasi Sektoral Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Entitas Informasi Sektoral Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar adalah bagian dari informasi dasar perencanaan pembangunan daerah yang terkait urusan sebagaimana tercantum dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
125	Informasi Sektoral Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Entitas Informasi Sektoral Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar adalah bagian dari informasi dasar perencanaan pembangunan daerah yang terkait urusan sebagaimana tercantum dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
126	Informasi Sektoral Urusan Pilihan	Entitas Informasi Sektoral Urusan Pilihan adalah bagian dari informasi dasar perencanaan pembangunan daerah yang terkait urusan sebagaimana tercantum dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
127	Kodefikasi	Entitas Tata penomoran identitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam fungsi perencanaan dan penganggaran

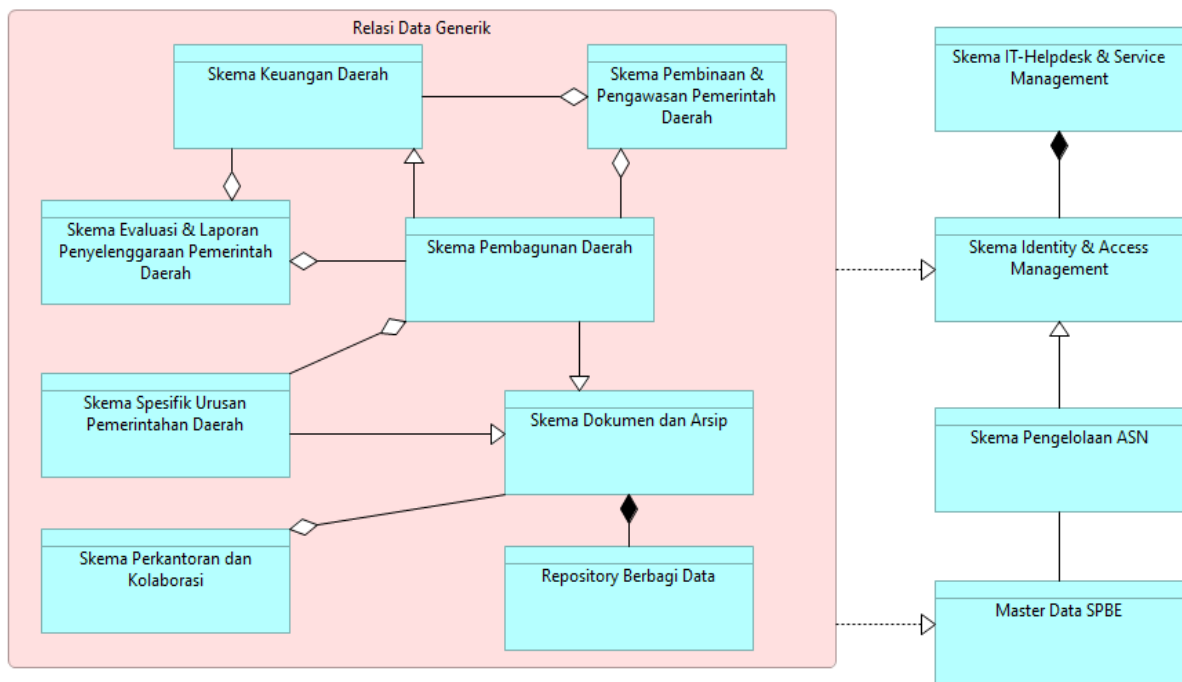
No	Nama Entitas	Deskripsi
128	Nomenklatur	Entitas Tata penamaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam fungsi perencanaan dan penganggaran
129	Perencanaan Pembangunan Daerah	Entitas Perencanaan Pembangunan Daerah adalah aktivitas penyusunan rancangan program/kegiatan secara terstruktur dan sistemik untuk pelaksanaan pembangunan daerah yang dilakukan secara periodic
130	RPJPD	Entitas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
131	Penyusunan RPJPD	Entitas Penyusunan RPJPD adalah aktifitas pencatatan, penetapan dan rancangan perencanaan menjadi dokumen RPJPD
132	Monitoring Penyusunan RPJPD	Entitas Monitoring Penyusunan RPJPD adalah aktivitas pemantauan terhadap pelaksanaan penyusunan RPJPD
133	RPJMD	Entitas RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan
134	Penyusunan RPJMD	Entitas Penyusunan RPJMD adalah aktifitas pencatatan, penetapan dan rancangan perencanaan menjadi dokumen RPJMD
135	Monitoring Penyusunan RPJMD	Entitas Monitoring Penyusunan RPJMD adalah aktivitas pemantauan terhadap pelaksanaan penyusunan RPJMD
136	KLHS	Entitas aspek pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam kebijakan, rencana dan program dalam RPJMD
137	Penyusunan KLHS	Entitas Penyusunan KLHS adalah aktifitas pencatatan, penetapan dan rancangan perencanaan menjadi dokumen KLHS
138	Monitoring Penyusunan KLHS	Entitas Monitoring Penyusunan KLHS adalah aktivitas pemantauan terhadap pelaksanaan penyusunan KLHS
139	Renstra PD	Entitas dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun
140	Penyusunan Renstra PD	Entitas Penyusunan Renstra PD adalah aktifitas pencatatan, penetapan dan rancangan perencanaan menjadi dokumen Renstra PD
141	Monitoring Penyusunan Renstra PD	Entitas Monitoring Penyusunan Renstra PD adalah aktivitas pemantauan terhadap pelaksanaan penyusunan Renstra PD
142	Renja PD	Entitas dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun
143	Penyusunan Renja PD	Entitas Penyusunan Renja PD adalah aktifitas pencatatan, penetapan dan rancangan perencanaan menjadi dokumen renja PD

No	Nama Entitas	Deskripsi
144	Monitoring Penyusunan Renja PD	Entitas Monitoring Penyusunan Renja PD adalah aktivitas pemantauan terhadap pelaksanaan penyusunan Renja PD
145	Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah	Entitas capaian sasaran dan hasil program pembangunan serta rencana target sasaran dan hasil program perencanaan pembangunan jangka panjang daerah
146	Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Entitas capaian sasaran dan hasil program pembangunan serta rencana target sasaran dan hasil program perencanaan pembangunan jangka menengah daerah
147	Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah	Entitas capaian sasaran dan hasil program pembangunan serta rencana target sasaran dan hasil program perencanaan pembangunan tahunan daerah
148	Koordinasi Teknis Pelaksanaan Pembangunan Tahunan Daerah	Entitas kebijakan, target rencana program dan kegiatan prioritas tahunan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan tahunan nasional telah dilaksanakan dalam kebijakan anggaran dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan prioritas tahunan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota
149	Koordinasi Teknis Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah	Entitas pencapaian target rencana pembangunan jangka panjang daerah dan konsistensi antar dokumen rencana dan anggaran
150	Koordinasi Teknis Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Entitas pencapaian target rencana pembangunan jangka menengah daerah dan konsistensi antar dokumen rencana dan anggaran
151	Koordinasi Teknis Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Tahunan Daerah	Entitas pencapaian target rencana pembangunan tahunan daerah dan konsistensi antar dokumen rencana dan anggaran
152	Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Entitas perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka Panjang daerah
153	Profil Pembangunan Daerah	Entitas gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional
154	Analisis Rencana Pembangunan Daerah	Entitas penjabaran atas hasil pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari

No	Nama Entitas	Deskripsi
		pembangunan nasional serta hubungan antara pembangunan daerah dengan pembangunan daerah lainnya
155	Analisis Hasil Pembangunan Daerah	Entitas hasil dari pelaksanaan pembangunan daerah
156	Analisis Rekomendasi Pembangunan Daerah	Entitas rekomendasi tentang pembangunan daerah
157	Informasi Geografis Daerah	Entitas kondisi atau keadaan wilayah dengan dilihat dari keadaan yang berkaitan dengan aspek geografis
158	Informasi Demografis	Entitas data statistik tentang suatu populasi
159	Informasi Potensi dan Sumber Daya Daerah	Entitas informasi segala sesuatu yang ada disuatu daerah yang dapat dimanfaatkan
160	Informasi Kesejahteraan Masyarakat	Entitas informasi keadaan sosial yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat jasmani, rohani dan sosial seuai dengan hakekat dan martabat manusia
161	Informasi Pelayanan Umum	Entitas informasi pelayanan secara umum
162	Informasi Daya Saing Daerah	Entitas informasi profil kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestic maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan
163	Informasi Ekonomi dan Keuangan Daerah	Entitas informasi ekonomi dan keuangan pemerintah daerah
164	Pokok Pikiran DPRD	Entitas kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses
165	Konsultasi Publik	Entitas kegiatan berbentuk komunikasi dua arah yang dilakukan secara pasif dan aktif untuk meminta pandangan masyarakat, berlangsung dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, baik berupa proses satu tahap atau proses yang berkelanjutan dengan tujuan mengumpulkan informasi untuk memfasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkualitas
166	Konsultasi Publik RPJPD	Entitas kegiatan berbentuk komunikasi dua arah yang dilakukan secara pasif dan aktif untuk meminta pandangan masyarakat, baik berupa proses satu tahap atau proses yang berkelanjutan dengan tujuan mengumpulkan informasi untuk memfasilitasi penyusunan RPJPD
167	Konsultasi Publik RPJMD	Entitas kegiatan berbentuk komunikasi dua arah yang dilakukan secara pasif dan aktif untuk meminta

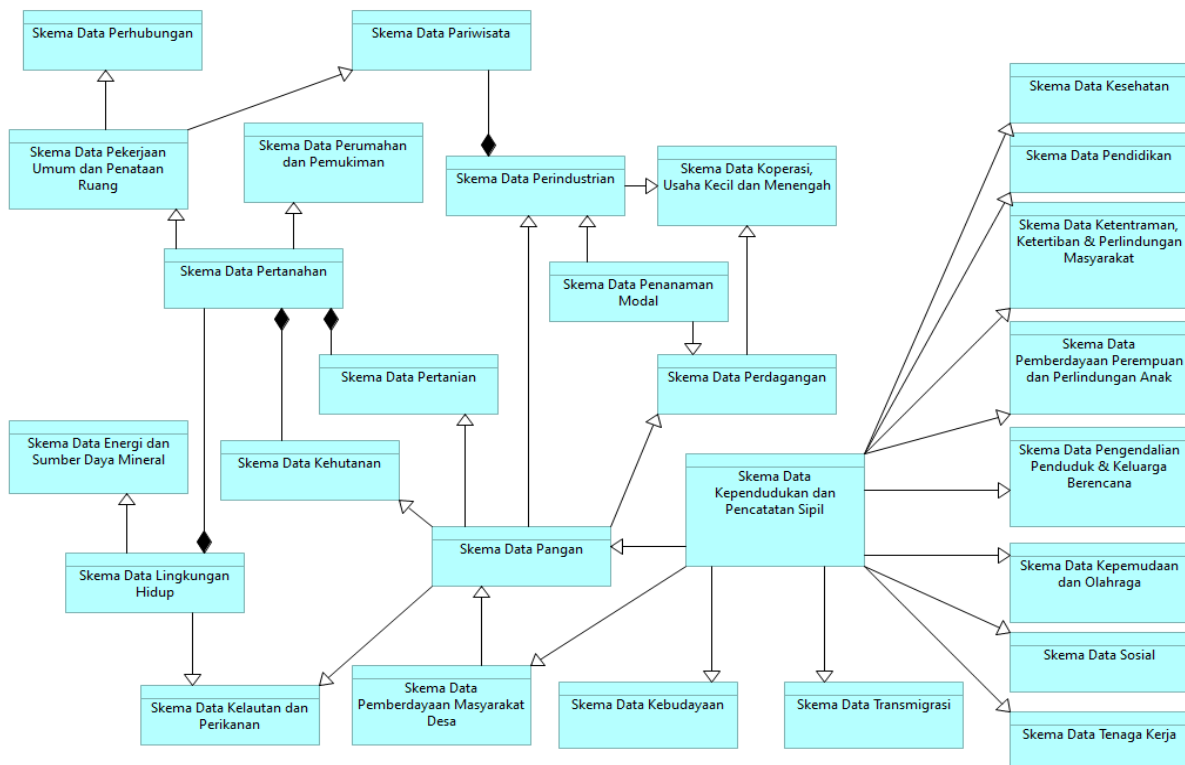
No	Nama Entitas	Deskripsi
		pandangan masyarakat, baik berupa proses satu tahap atau proses yang berkelanjutan dengan tujuan mengumpulkan informasi untuk memfasilitasi penyusunan RPJMD
168	Konsultasi Publik RKPD	Entitas kegiatan berbentuk komunikasi dua arah yang dilakukan secara pasif dan aktif untuk meminta pandangan masyarakat, baik berupa proses satu tahap atau proses yang berkelanjutan dengan tujuan mengumpulkan informasi untuk memfasilitasi penyusunan RKPD
169	Musrenbang	Entitas forum antar pemangku kepentingan dalam rangka Menyusun rencana pembangunan daerah
170	Musrenbang Provinsi	Entitas forum antar pemangku kepentingan dalam rangka Menyusun rencana pembangunan daerah provinsi
171	Musrenbang Kabupaten/Kota	Entitas forum antar pemangku kepentingan dalam rangka Menyusun rencana pembangunan daerah kabupaten atau kota
172	Musrenbang Kecamatan	Entitas forum antar pemangku kepentingan dalam rangka Menyusun rencana pembangunan di kecamatan
173	Musrenbang Kelurahan	Entitas forum antar pemangku kepentingan dalam rangka Menyusun rencana pembangunan di kelurahan
174	Musrenbang Desa	Entitas forum antar pemangku kepentingan dalam rangka Menyusun rencana pembangunan di desa
175	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Entitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan di daerah provinsi
176	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Entitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan di daerah kabupaten/kota
177	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Entitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan di kecamatan
178	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	Entitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan di kelurahan
179	Pelaksanaan Musrenbang Desa	Entitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan di desa
180	Forum SKPD	Entitas agenda tahunan sebagai koordinasi antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang
181	Forum SKPD Penyusunan Renstra PD	Entitas agenda tahunan untuk membahas prioritas dan kegiatan penyusunan renstra PD
182	Forum SKPD Penyusunan Renja PD	Entitas agenda tahunan untuk membahas prioritas dan kegiatan penyusunan renja PD

2.2.1. Diagram Kontek Relasi Data Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Natuna



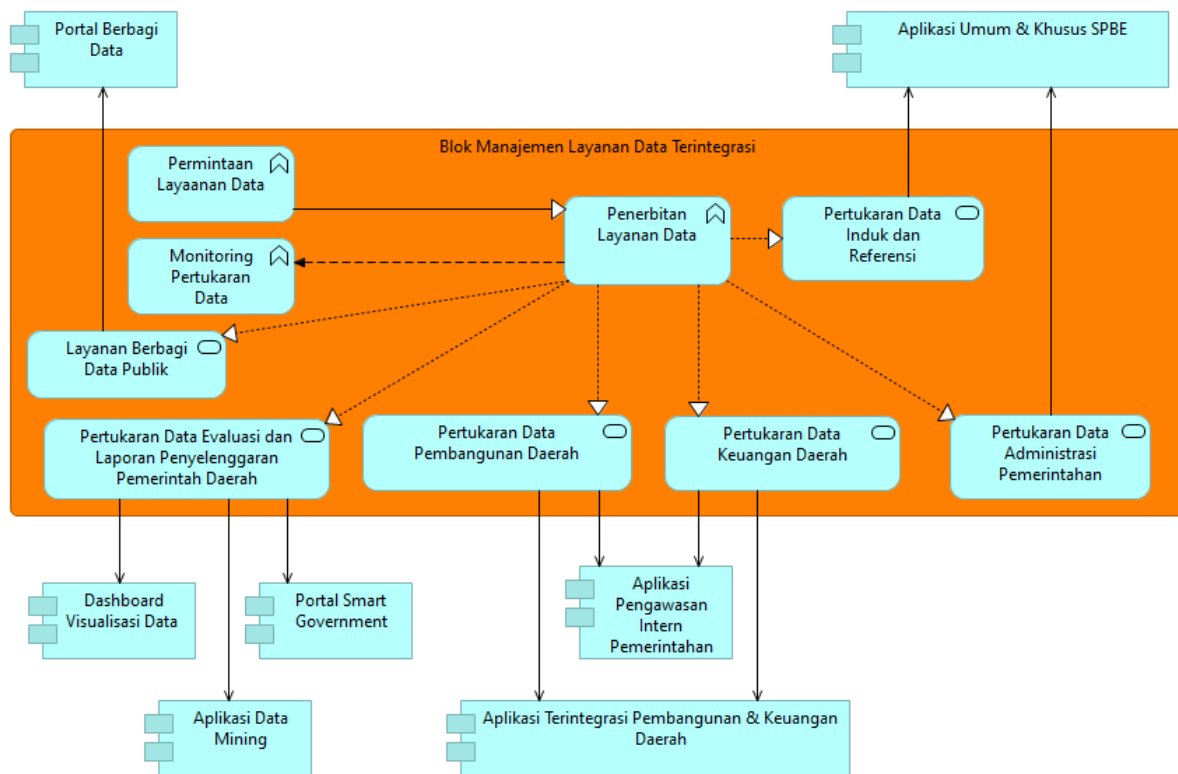
Gambar 2. 2 Diagram Kontek Relasi Data Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Natuna

2.2.2. Diagram Kontek Relasi Data Urusan Pemerintah Kabupaten Natuna



Gambar 2. 3 Diagram Kontek Relasi Urusan Pemerintahan Kabupaten Natuna

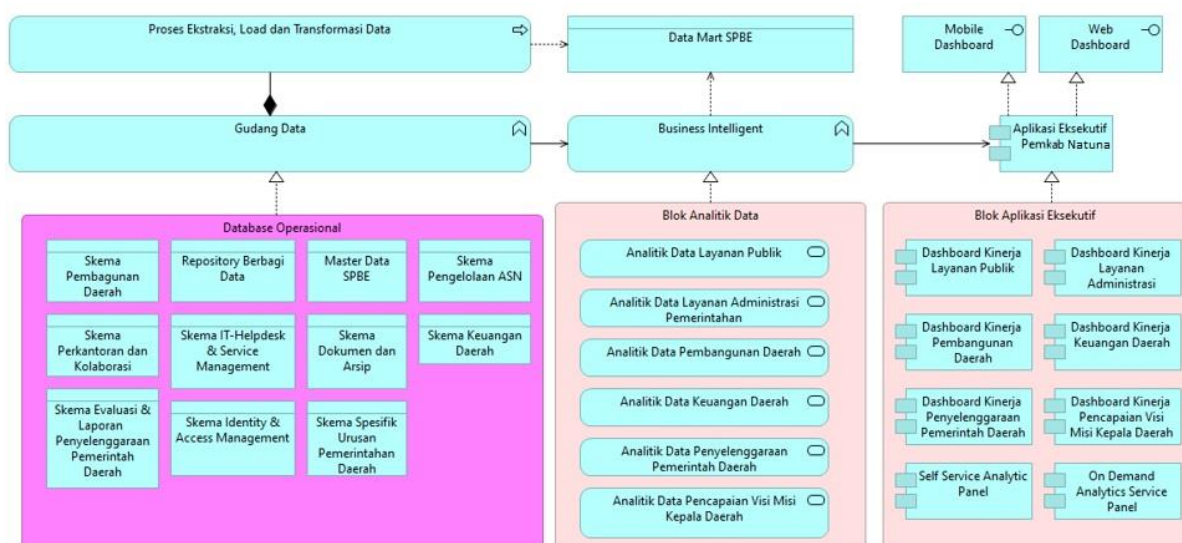
2.2.3. Model Layanan Pertukaran Dan Integrasi Data



Gambar 2. 4 Model Layanan Pertukaran dan Integrasi Data

2.3 GUDANG DATA DAN BUSINESS INTELLIGENT DI PEMERINTAHAN KABUPATEN NATUNA

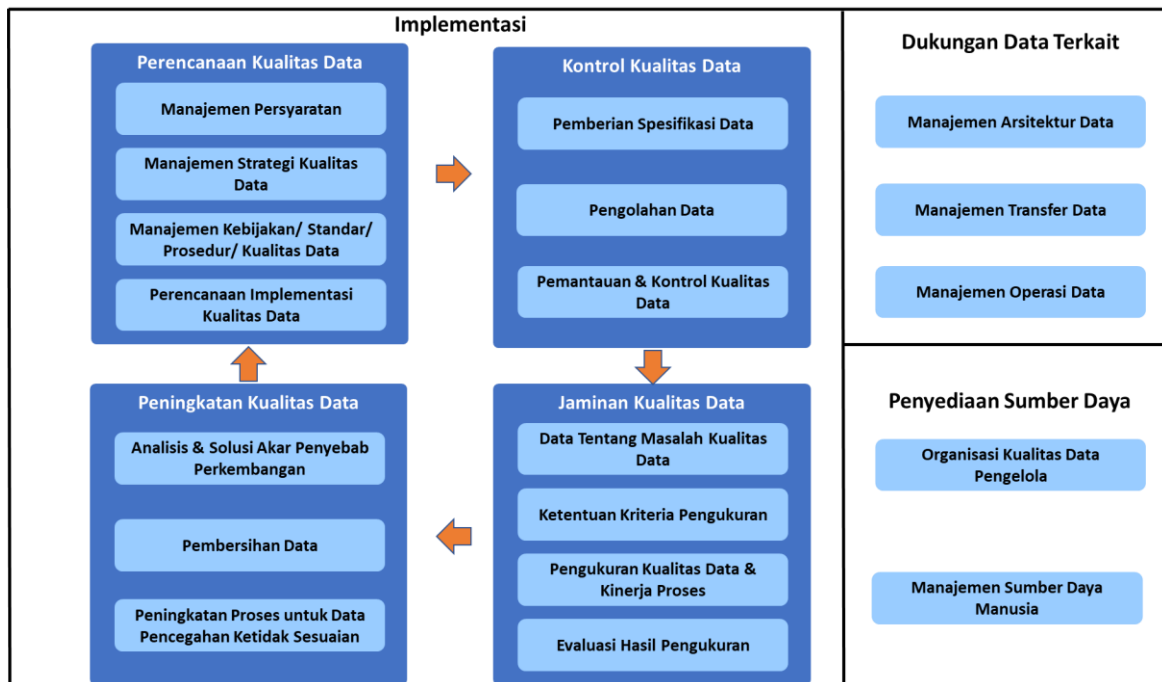
Model Gudang Data dan Business Intelligent yang dapat diterapkan di Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 5 Gudang Data dan Business Intelligent

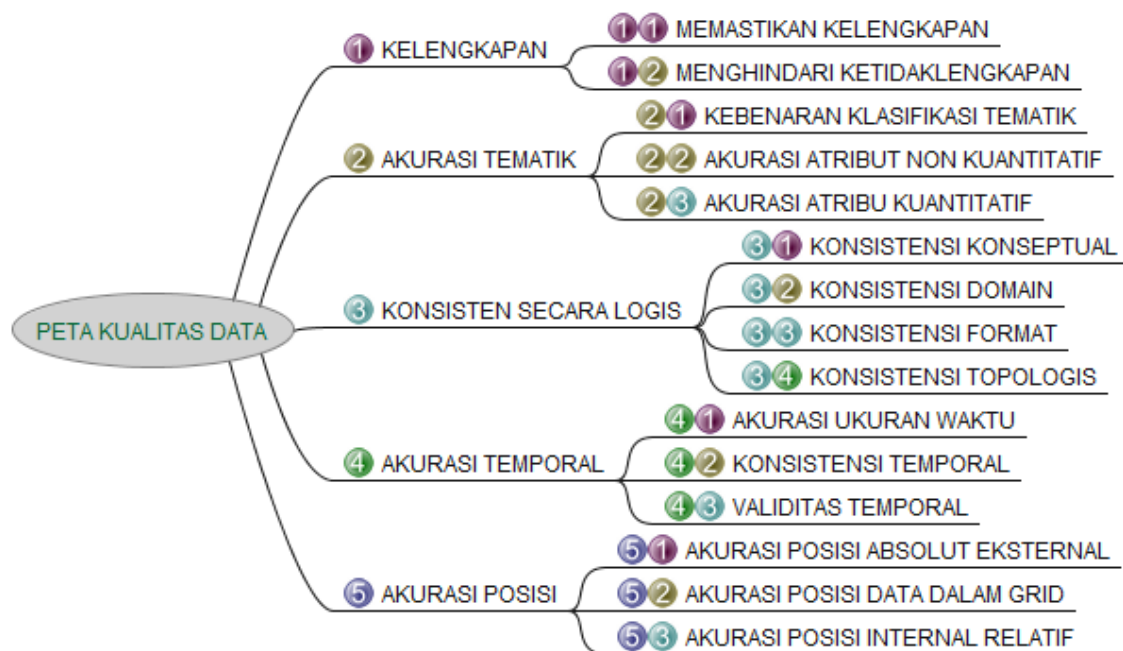
2.4 PENGELOLAAN KUALITAS DATA

Pengelolaan Kualitas data SPBE Kabupaten Natuna sekurang-kurangnya mengikuti model sebagai berikut:



Gambar 2. 6 Pengelolaan Kualitas Data

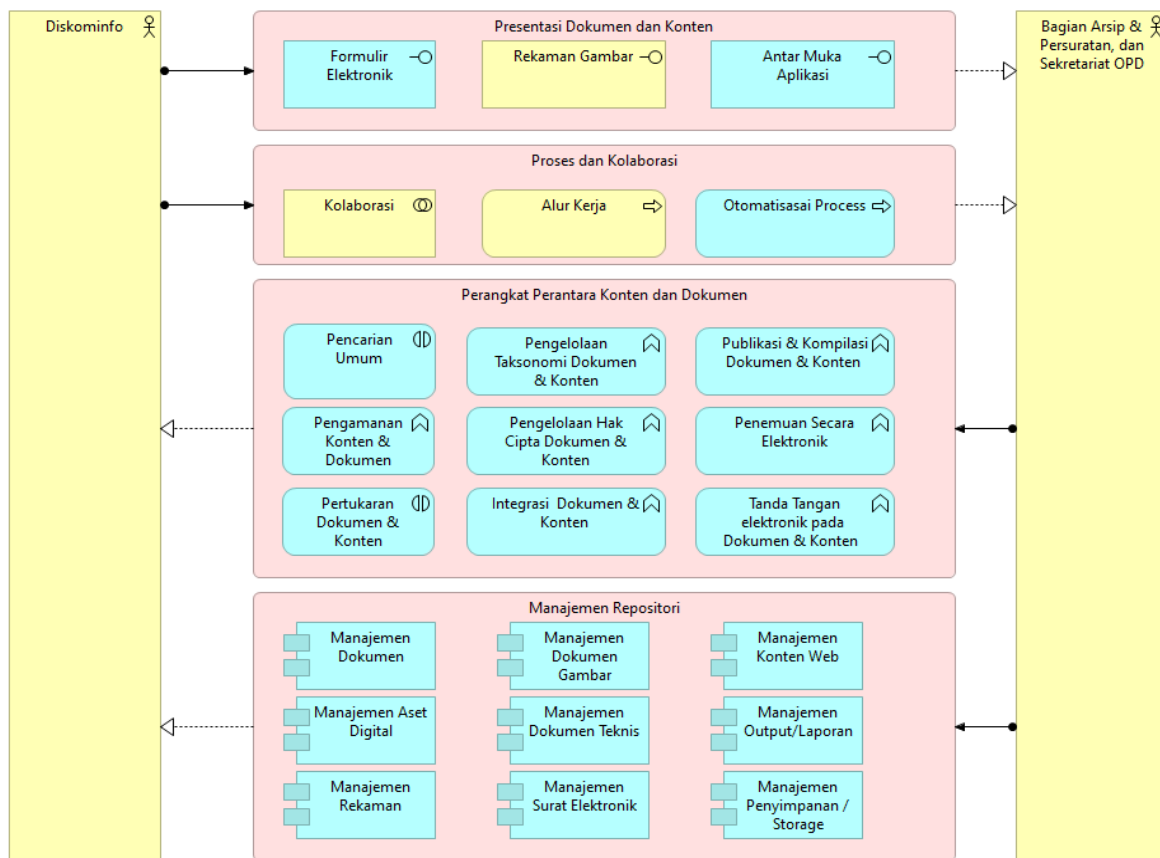
Adapun persyaratan kualitas Data mengikuti standar internasional ISO yaitu:



Gambar 2. 7 Persyaratan Kualitas Data

2.5 PENGELOLAAN KONTEN DAN DOKUMEN

Model pengelolaan konten dan dokumen meliputi beberapa blok lapisan fungsi yang terdiri dari:



Gambar 2. 8 Pengelolaan Konten dan Dokumen

BAB III

ARSITEKTUR LAYANAN

Layanan SPBE merupakan luaran dari sebuah atau beberapa proses bisnis dan disajikan kepada pengguna dengan mencerminkan karakteristik layanan tertentu, serta diselaraskan dengan berbagai inisiatif strategis, program nasional, dan peraturan perundang-undangan terkait layanan pemerintah.

3.1 REFERENSI ARSITEKTUR LAYANAN

Tabel 3. 1 Referensi Arsitektur Layanan

Referensi Arsitektur Layanan (RAL)		
Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.01. Pertahanan	Pertahanan Siber
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.01. Pertahanan	Kerja Sama Internasional Pertahanan dan Keamanan
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.01. Pertahanan	Pertahanan Negara
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.01. Pertahanan	Intelejen
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.01. Pertahanan	Koordinasi Intelijen
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.01. Pertahanan	Ketahanan Nasional
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.01. Pertahanan	Penanggulangan ancaman
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.01. Pertahanan	Instalasi strategis dan potensi pertahanan
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.01. Pertahanan	Penelitian Ketahanan Nasional
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.02. Urusan Luar Negeri	Diplomasi Internasional
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.02. Urusan Luar Negeri	Misi Kemanusiaan
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.02. Urusan Luar Negeri	Misi Perdamaian Dunia
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.02. Urusan Luar Negeri	Politik luar negeri
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.02. Urusan Luar Negeri	kerja sama international
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.03. Kenegaraan	Kelembagaan Negara
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.03. Kenegaraan	Nilai-nilai Kebangsaan
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.03. Kenegaraan	Pemasyarakatan UUD 45 dan Pancasila
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.03. Kenegaraan	Pembangunan Manusia Indonesia
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.03. Kenegaraan	Politik
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.03. Kenegaraan	Penyerapan Aspirasi Masyarakat
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.03. Kenegaraan	Program Prioritas Nasional
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.04. Ekonomi	Ekonomi Makro
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.04. Ekonomi	Kebijakan Perekonomian
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.04. Ekonomi	Litigasi Perekonomian

Referensi Arsitektur Layanan (RAL)		
Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.05. Industri	Manajemen Ekonomi Kreatif
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.05. Industri	Pengembangan Ekonomi Digital
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.05. Industri	Pajak dan Cukai
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.05. Industri	Pelayanan PNPB
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.05. Industri	Industri Maritim
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.05. Industri	Ketahanan Industri
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.05. Industri	Peneraan/Kalibrasi
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.05. Industri	Pengembangan Industri
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.05. Industri	Pengembangan Industri Hijau
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.05. Industri	Pengembangan Industri Strategis
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.05. Industri	Pengembangan Produk Kreatif
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.05. Industri	Standar Nasional Indonesia
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.06. Perdagangan	Ekspor dan Impor
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.06. Perdagangan	Penggunaan Produk Dalam Negeri
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.06. Perdagangan	Perdagangan Berjangka Komoditi
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.06. Perdagangan	Perdagangan Domestik
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.06. Perdagangan	Perlindungan Konsumen
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.07. Pertanian	Pertanian
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.07. Pertanian	Ketahanan Pangan
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.08. Perkebunan	Benih dan Bibit Perkebunan
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.08. Perkebunan	pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.08. Perkebunan	pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.08. Perkebunan	kebijakan perkebunan
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.09. Peternakan	Benih dan Bibit Ternak
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.09. Peternakan	kebijakan peternakan
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.09. Peternakan	pascapanen peternakan
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.09. Peternakan	peningkatan kesehatan masyarakat veteriner
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.09. Peternakan	penyehatan hewan
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.10. Perikanan	Perikanan Budi Daya
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.10. Perikanan	Benih dan Bibit Perikanan Budi Daya
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.10. Perikanan	kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.11. Badan Usaha Milik Negara	Bisnis Strategis
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.11. Badan Usaha Milik Negara	keberlanjutan BUMN/BUMD
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.11. Badan Usaha Milik Negara	pengembangan usaha BUMN/BUMD
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.11. Badan Usaha Milik Negara	penguatan daya saing BUMN/BUMD
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.11. Badan Usaha Milik Negara	peningkatan kinerja BUMN/BUMD

Referensi Arsitektur Layanan (RAL)		
Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.12. Investasi	penyelesaian isu investasi
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.12. Investasi	perencanaan penanaman modal nasional
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.12. Investasi	promosi penanaman modal
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.12. Investasi	pengembangan sektor usaha penanaman modal
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.12. Investasi	penanaman modal nasional
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.12. Investasi	pembinaan pelaksanaan penanaman modal
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.12. Investasi	pelayanan fasilitas penanaman modal
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.12. Investasi	kebijakan pelayanan penanaman modal
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.13. Koperasi	Koperasi dan Usaha Mikro
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.14. Usaha Kecil Dan Menengah	Dukungan Bisnis
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.14. Usaha Kecil Dan Menengah	Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.15. Pariwisata	Pengembangan Kepariwisata
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.15. Pariwisata	Pengembangan Lembaga Kepariwisata
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.15. Pariwisata	Pengembangan Objek Wisata
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.16. Perizinan dan Akreditasi	Akreditasi Lembaga Kesuaian/Peneraan
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.16. Perizinan dan Akreditasi	Akreditasi Lembaga Sertifikasi
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.16. Perizinan dan Akreditasi	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.16. Perizinan dan Akreditasi	Perizinan Penanaman Modal
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.16. Perizinan dan Akreditasi	Perizinan Perekrutan Pekerja Migran Indonesia
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.17. Pekerjaan Umum	Sarana dan Prasarana Strategis
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.18. Transmigrasi	
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.19. Transportasi	Kemananan dan Keselamatan Transportasi
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.19. Transportasi	Pelayanan Transportasi
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.20. Perumahan	Infrastruktur Permukiman
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.20. Perumahan	Kawasan Permukiman
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.20. Perumahan	Perumahan Rakyat
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.21. Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Pengembangan Daerah Tertentu
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.22. Pertanahan	
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.23. Kependudukan	Pengendalian Penduduk
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.23. Kependudukan	Kebijakan Kependudukan
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.23. Kependudukan	Pencatatan Sipil
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.23. Kependudukan	Keluarga Berencana

Referensi Arsitektur Layanan (RAL)		
Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.24. Pemerintahan daerah	Keikutsertaan Masyarakat
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.24. Pemerintahan daerah	Otonomi Daerah
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.24. Pemerintahan daerah	Administrasi Kewilayahan
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.24. Pemerintahan daerah	Pengayoman Masyarakat
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.24. Pemerintahan daerah	Pemeliharaan Ketentraman Masyarakat
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.24. Pemerintahan daerah	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Farmasi dan Alat Kesehatan
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Kesehatan Masyarakat
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Pemberdayaan Tenaga Kesehatan
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Penanggulangan Narkotika
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Pengawasan Obat dan Makanan
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Pengendalian Penyakit
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Pengujian Bahan Adiktif
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Rehabilitasi
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.26. Sosial	Kebijakan Jaminan Sosial
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.26. Sosial	Penanganan Fakir Miskin
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.27. Pemberdayaan Perempuan	Kesetaraan Gender
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.27. Pemberdayaan Perempuan	Perlindungan Anak
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.27. Pemberdayaan Perempuan	Perlindungan Hak Perempuan
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.28. Hukum	Keimigrasian
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.28. Hukum	Lembaga Pemasyarakatan
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.29. Keamanan	Penegakan Hukum
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.29. Keamanan	Pengadilan
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.29. Keamanan	Peningkatan Lembaga Rehabilitasi
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.29. Keamanan	Intelijen Keamanan
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.29. Keamanan	
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.29. Keamanan	Keamanan dan Ketertiban Umum
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.29. Keamanan	Pengelolaan Lalu Lintas
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.29. Keamanan	Penanggulangan Ancaman Terorisme
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.29. Keamanan	Pemupukan Jiwa Korsa
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.30. Hak Asasi Manusia	Perlindungan HaKI
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.30. Hak Asasi Manusia	Kepustakaan
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31. Pendidikan	Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31. Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini

Referensi Arsitektur Layanan (RAL)		
Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31. Pendidikan	Pendidikan Dasar
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31. Pendidikan	Pendidikan Khusus
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31. Pendidikan	Pendidikan Menengah
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31. Pendidikan	Pendidikan non-Formal
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31. Pendidikan	Pendidikan Tinggi
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31. Pendidikan	Pembinaan Kepustakaan
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.32. Ketenagakerjaan	Keselamatan Kerja
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.32. Ketenagakerjaan	Pengelolaan Ketenagakerjaan
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.32. Ketenagakerjaan	Pengelolaan Pekerja Migran Indonesia
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.32. Ketenagakerjaan	Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.32. Ketenagakerjaan	Penempatan Tenaga Kerja
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.33. Ilmu Pengetahuan dan teknologi	Penelitian dan Pengembangan Sektor Tertentu
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.33. Ilmu Pengetahuan dan teknologi	Alih Teknologi
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.33. Ilmu Pengetahuan dan teknologi	Inovasi Teknologi
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.33. Ilmu Pengetahuan dan teknologi	Kemitraan Teknologi
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.33. Ilmu Pengetahuan dan teknologi	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.33. Ilmu Pengetahuan dan teknologi	Teknologi Nuklir
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.33. Ilmu Pengetahuan dan teknologi	Pengkajian dan Penerapan Teknologi
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.33. Ilmu Pengetahuan dan teknologi	y
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.33. Ilmu Pengetahuan dan teknologi	Teknologi Penerbangan dan Antariksa
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.33. Ilmu Pengetahuan dan teknologi	Teknologi Penginderaan Jauh
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.34. Pemuda	Pemberdayaan Pemuda
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.35. Olahraga	kebijakan di bidang pembudayaan olahraga
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.35. Olahraga	kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.36. Pertambangan	
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.37. Energi	Energi Baru
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.37. Energi	Energi Fosil
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.37. Energi	Energi Nuklir
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.37. Energi	Energi Terbarukan
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.37. Energi	Kelistrikan
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.37. Energi	Konservasi Energi
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.37. Energi	Bio Energi
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.38. Kehutanan	Kebakaran Hutan dan Lahan

Referensi Arsitektur Layanan (RAL)		
Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.38. Kehutanan	kebijakan di bidang pengelolaan hutan produksi lestari
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.38. Kehutanan	kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan secara berkelanjutan
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.38. Kehutanan	kebijakan di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.38. Kehutanan	penyuluhan di bidang kehutanan
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.39. Kelautan	Perikanan Tangkap
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.39. Kelautan	keamanan hasil perikanan tangkap
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.39. Kelautan	kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.39. Kelautan	pengendalian mutu hasil perikanan tangkap
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.40. Lingkungan Hidup	Dampak Perubahan Iklim
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.40. Lingkungan Hidup	Konservasi Alam dan Pelestarian Ekosistem
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.40. Lingkungan Hidup	Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.40. Lingkungan Hidup	Pengawasan dan Keamanan Sumber Daya Alam
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.40. Lingkungan Hidup	Perkarantina
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.40. Lingkungan Hidup	Penanggulangan Bencana
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.40. Lingkungan Hidup	Pencarian dan Pertolongan
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.40. Lingkungan Hidup	Observasi
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.41. Agama	Haji dan Umroh
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.41. Agama	Kebijakan Hidup Beragama
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.41. Agama	Produk Halal
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.42. Kebudayaan	kebijakan kebudayaan
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.42. Kebudayaan	Perfilman dan Kesenian
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.42. Kebudayaan	Sastra dan Bahasa Indonesia
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.42. Kebudayaan	Cagar Budaya
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.43. Informasi	Informasi Geospasial
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.43. Informasi	Informasi Statistik
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.43. Informasi	Pelayanan Informasi
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.43. Informasi	penyelenggaraan penyiaran radio publik
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.43. Informasi	penyelenggaraan penyiaran televisi publik
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.43. Informasi	Kearsipan Nasional
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.43. Informasi	Hubungan Masyarakat
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.44. Komunikasi	Pos
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.44. Komunikasi	Sistem Komunikasi Publik

Referensi Arsitektur Layanan (RAL)		
Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.44. Komunikasi	Sistem Komunikasi Tertentu
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.01. Dalam Negeri	
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02.Keuangan	Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02.Keuangan	Pencarian Sumber-sumber Pembiayaan
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02.Keuangan	Perbendaharaan
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02.Keuangan	Penganggaran
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02.Keuangan	Pengelolaan Barang Milik Negara
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02.Keuangan	Rekomendasi Fiskal
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02.Keuangan	Rekomendasi Keuangan
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02.Keuangan	Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02.Keuangan	Pengelolaan Keuangan
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.03. Perencanaan Pembangunan Nasional	Pembangunan Nasional
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.03. Perencanaan Pembangunan Nasional	Penyusunan Perencanaan
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.03. Perencanaan Pembangunan Nasional	Koordinasi Perencanaan
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.03. Perencanaan Pembangunan Nasional	Evaluasi Perencanaan
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.03. Perencanaan Pembangunan Nasional	Penyusunan RAPBN
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.03. Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Nasional
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.03. Perencanaan Pembangunan Nasional	Pengalokasian Dana Pembangunan
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.03. Perencanaan Pembangunan Nasional	Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.03. Perencanaan Pembangunan Nasional	Koordinasi Pembangunan Nasional
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	RAL 02.04.01. Manajemen Kepegawaian
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	RAL 02.04.02. Pembinaan Jabatan Fungsional
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	RAL 02.04.03. Pendidikan dan Pelatihan Keahlian
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	RAL 02.04.04. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	RAL 02.04.05. Penetapan Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	RAL 02.04.06. Pengkajian Manajemen ASN
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	RAL 02.04.07. Tata Kelola dan Tata Laksana Organisasi

Referensi Arsitektur Layanan (RAL)		
Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	RAL 02.04.08. Penyelenggaraan Pelayanan Publik
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	RAL 02.04.09. Manajemen Reformasi Birokrasi
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	RAL 02.04.10. Pemetaan Potensi PNS
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.05. Kesekretariatan Negara	Pemerintahan Umum
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	dukungan kerumahtanggaan Presiden
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	dukungan teknis Presiden
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	dukungan administrasi Presiden
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	Sistem Pelaporan
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	Bantuan Hukum
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	Dukungan Administrasi Organisasi
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	Dukungan Finansial
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	Dukungan Substantif Organisasi
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	Sarana dan Prasarana
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	Keprotokolan
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	Dukungan Teknis Operasional
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	Dukungan Penerjemahan
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	Dukungan Logistik
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	Dukungan Persidangan
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	Dukungan Keahlian
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	Koordinasi Pengembangan Kapasitas
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	Dukungan Kearsipan
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.07. Akuntabilitas Kinerja	Pembinaan Kegiatan Pengawasan
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.07. Akuntabilitas Kinerja	Pengawasan Kinerja
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.08. Organisasi dan Tata Kelola	Pengawasan Fungsi Organisasi
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.08. Organisasi dan Tata Kelola	Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

Referensi Arsitektur Layanan (RAL)		
Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.08. Organisasi dan Tata Kelola	Pembinaan Organisasi
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.08. Organisasi dan Tata Kelola	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.08. Organisasi dan Tata Kelola	Bimbingan Teknis dan Supervisi
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.08. Organisasi dan Tata Kelola	Pembinaan Teknis
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.08. Organisasi dan Tata Kelola	Kerja Sama antar Instansi
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.08. Organisasi dan Tata Kelola	Pengendalian Sumber Daya Kerja Sama
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.09. Data dan Informasi Pemerintahan	Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Informatika
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.09. Data dan Informasi Pemerintahan	Penyelenggaraan Informatika
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.09. Data dan Informasi Pemerintahan	Pengelolaan Data dan Informasi
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.09. Data dan Informasi Pemerintahan	Pengelolaan Sistem Informasi
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.09. Data dan Informasi Pemerintahan	Statistik Dasar
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.09. Data dan Informasi Pemerintahan	Statistik Sektorial
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.09. Data dan Informasi Pemerintahan	Statistik Khusus
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.10. Penyelenggaraan SPBE	Tata Kelola SPBE
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.10. Penyelenggaraan SPBE	Manajemen SPBE
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.10. Penyelenggaraan SPBE	Layanan SPBE
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.10. Penyelenggaraan SPBE	Infrastruktur SPBE
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.10. Penyelenggaraan SPBE	Aplikasi SPBE
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.10. Penyelenggaraan SPBE	Keamanan SPBE
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.10. Penyelenggaraan SPBE	Audit TIK
RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.10. Penyelenggaraan SPBE	Pengintegrasian Pelaksanaan Kegiatan/Program

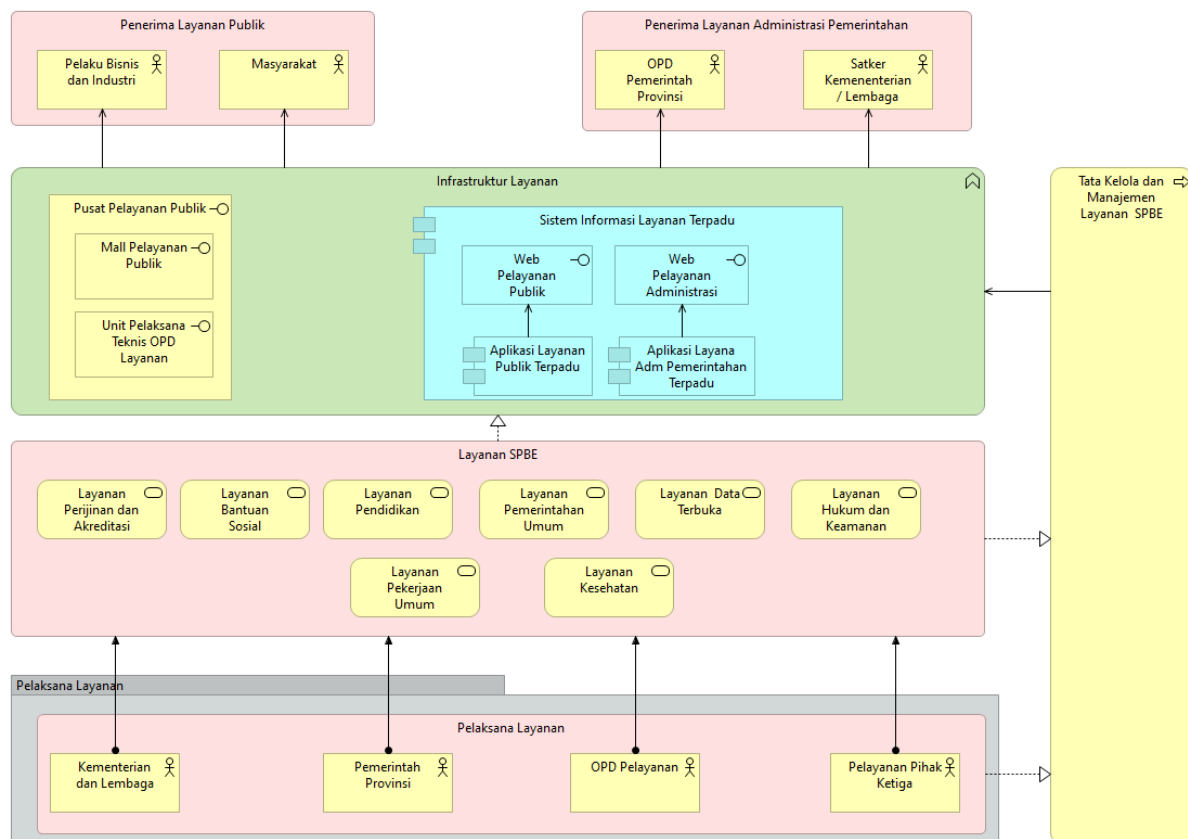
3.2 ARSITEKTUR KONSEPTUAL LAYANAN SPBE

Secara konseptual Layanan SPBE terdiri dari beberapa komponen yaitu:

1. Pelaksana Layanan
 - a. OPD Pelayanan Kabupaten Natuna
 - b. Kementerian dan Lembaga Negara
 - c. Pemerintah Provinsi

- d. Penyedia layanan pihak Ketiga
- 2. Penerima Layanan
 - a. Penerima Layanan Publik
 - i. Masyarakat
 - ii. Pelaku bisnis dan Industri
 - b. Penerima Layanan Administrasi Pemerintahan
 - i. OPD Pemerintah Provinsi
 - ii. Satker Kementerian dan Lembaga
- 3. Katalog Layanan
 - a. Layanan Perijinan dan Akreditasi
 - b. Layanan Bantuan Sosial
 - c. Layanan Pendidikan
 - d. Layanan Pekerjaan Umum
 - e. Layanan Kesehatan
 - f. Layanan Data Terbuka
 - g. Layanan Hukum dan Keamanan
 - h. Layanan Pemerintahan Umum
- 4. Infrastruktur Layanan
 - a. Pusat Layanan Publik
 - i. Mall Pelayanan Publik
 - ii. Unit Pelaksana Teknis OPD Layanan
 - b. Sistem Layanan Terintegrasi
 - i. Aplikasi Layanan Publik
 - ii. Aplikasi Layanan Administrasi Pemerintahan
- 5. Tata Kelola dan Manajemen Layanan

Sebagaimana tergambar pada diagram berikut ini:



Gambar 3. 1 Konseptual Layanan SPBE

- Pelaksana Layanan adalah pihak penyedia layanan yang bersentuhan langsung dengan para pengguna layanan. Pelaksana layanan ini tidak terbatas pada OPD dari pemerintah Kabupaten Natuna tapi juga pihak terkait baik Swasta atau Kementerian dan Lembaga Negara yang memberikan layanan langsung pada pengguna layanan
- Pengguna Layanan adalah pihak penerima layanan yang disediakan oleh para pelaksana layanan. Pengguna layanan dapat meminta dan menerima layanan sesuai dengan layanan yang ada pada katalog layanan.
- Katalog layanan adalah jenis layanan yang diberikan oleh pelaksana layanan baik OPD Kabupaten Natuna atau pihak ketiga dari Swasta atau Kementerian dan Lembaga Negara.
- Infrastruktur layanan adalah sarana dan prasarana yang mendukung terselenggaranya layanan yang terdiri dari infrastruktur sistem dan infrastruktur fisik.
- Tata Kelola dan Manajemen Layanan adalah suprastruktur dari layanan yang memayungi pelaksanaan dan penyelenggaraan layanan yang diberikan oleh pelaksanaan layanan dan Pengguna layanan.

3.3 PETA LAYANAN LAYANAN SPBE

Berdasarkan referensi arsitektur layanan terdapat 8 jenis kelompok layanan yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Natuna yaitu :

- Layanan Perijinan dan Akreditasi
- Layanan Bantuan Sosial
- Layanan Pendidikan
- Layanan Pekerjaan Umum
- Layanan Kesehatan
- Layanan Data Terbuka
- Layanan Hukum dan Keamanan
- Layanan Pemerintahan Umum

Pemetaan layanan terhadap Urusan Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Pemetaan Layanan Terhadap Urusan Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Urusan Pemerintahan Kab Natuna	Layanan Perijinan dan Akreditasi	Layanan Bantuan Sosial	Layanan Pendidikan	Layanan Pekerjaan Umum	Layanan Kesehatan	Layanan Data Terbuka	Layanan Hukum dan Keamanan	Layanan Pemerintahan Umum
1	Bidang Kesehatan	X				X	X		
2	Bidang Pendidikan	X		X			X		X
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X				X	X		
4	Bidang Perumahan dan Pemukiman	X					X		
5	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	X					X		
6	Bidang Sosial	X	X				X		
7	Bidang Tenaga Kerja	X		X			X	X	X
8	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak		X	X			X	X	
9	Bidang Pangan						X	X	
10	Bidang Pertanahan	X					X	X	
11	Bidang Lingkungan Hidup	X					X	X	
12	Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	X					X	X	
13	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			X			X		
14	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						X		
15	Bidang Perhubungan	X					X	X	
16	Bidang Komunikasi dan Informatika	X		X			X		
17	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	X		X			X		
18	Bidang Penanaman Modal	X					X		
19	Bidang Pemuda dan Olah Raga			X			X		
20	Bidang Statistik						X		X
21	Bidang Persandian							X	X
22	Bidang Kebudayaan						X		
23	Bidang Perpustakaan			X			X		
24	Bidang Kearsipan	X					X		
25	Bidang Kelautan dan Perikanan	X		X			X		
26	Bidang Pariwisata			X			X		
27	Bidang Pertanian	X		X			X		
28	Bidang Kehutanan						X		
29	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	X							
30	Bidang Perdagangan	X		X			X	X	
31	Bidang Perindustrian								
32	Bidang Perijinan	X		X			X		